



Swantara

Majalah Triwulan Lemhannas RI No. 57 Juni 2026

Seputar Kita

Lemhannas RI Gelar KPPD
Ketua DPRD, Dorong Sinergi
Pusat dan Daerah

Profil Pejabat

Laksamana Madya TNI Erwin S.
Aldedharma...."Lemhannas harus menjadi tempat
lahirnya para pemimpin nasional yang memiliki
wawasan kebangsaan, memahami sejarah bangsa,
dan mampu membaca dinamika geopolitik...."

Opini

Menjaga Ketahanan
Ekonomi sebagai Pilar
Utama Asta Cita di Tengah
Dinamika Geopolitik Global



Versi Digital

TRANSFORMASI LEMHANNAS RI

Memperkokoh Ketahanan Nasional untuk
Mewujudkan Asta Cita menuju
Indonesia Emas 2045



1 MUHARRAM 1448 H

TAHUN BARU HIJRIYAH





Salam Redaksi

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Shalom
Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan*

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, Majalah Swantara Edisi 56, Maret 2026, telah terbit di tengah-tengah kita. Tim Redaksi Majalah Swantara terus berupaya maksimal dalam menyajikan berbagai informasi pilihan melalui beragam rubrik. Diharapkan sajian informasi dalam Majalah Swantara dapat memberikan sudut pandang baru yang membuka wawasan dan pengetahuan pembaca.

Untuk rubrik Laporan Utama pada edisi kali ini membahas Lemhannas Goes to Campus yang diluncurkan sebagai upaya mendekatkan nilai-nilai kebangsaan kepada kalangan mahasiswa dan pemuda.

Pada rubrik Seputar Kita, redaksi menyajikan informasi terkait ide, gagasan, dan kegiatan yang dilaksanakan Lemhannas RI. Sementara itu, rubrik Profil Pejabat mengangkat sosok pejabat Lemhannas RI yang baru dilantik serta Profil Pegawai yang berisi personel berprestasi, sehingga pembaca dapat mengenal lebih dekat dan menjadikannya inspirasi. Selain itu, tim redaksi juga menghadirkan rubrik lain seperti Opini, Hot News, dan Ragam, yang dapat menjadi referensi tambahan dalam memperkaya pengetahuan pembaca setia Majalah Swantara.

Tim redaksi menyadari bahwa Majalah Swantara masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, redaksi sangat mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca demi keberlangsungan serta peningkatan kualitas k pada edisi-edisi berikutnya.

Terakhir, tim redaksi menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam terbitnya Majalah Swantara Edisi 56, Desember 2026. Semoga Majalah Swantara dapat memberikan banyak manfaat dan berkesan di hati para pembaca. *Verba valent, scripta manent.*

*Om Shanti Shanti Shanti Om
Namu Buddhaya
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

PELINDUNG ACE HASAN SYADZILY

PENGARAH R. Z. PANCA PUTRA S.

PENANGGUNGJAWAB/PEMIMPIN REDAKSI

MUHAMMAD ARIF NUR

REDAKTUR BAMBANG IMAN ARYANTO

PENYUNTING/EDITOR CAHYAQADRI HILDAMONA,

MAGISTA DIAN FITRILIA

DESAIN GRAFIS ARINI MAULIDIA

FOTOGRAFER WIA YUNIA PUTRI

SEKRETARIAT DWI ARIYANI, MAULIDA ARBANINGSIH

PENULIS ARTIKEL ANGGA MITRA TAMA, MAULIDA ARBANINGSIH, NAOMI AUGUSTINA, SUCITRA PUTERI RACHMAN, ANGGA MITRA TAMA, DWI ARIYANI, ARINI MAULIDIA

**ALAMAT REDAKSI BIRO HUMAS LEMHANNAS RI
JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA 10110**

Telp. (021) 3832470

Email: redaksihumaspubbit@gmail.com

Instagram: @lemhannas_ri

Facebook: @lembagaketahanannasionalri

Twitter: @LemhannasRI

Youtube: Lemhannas RI

TikTok: @lemhannas_ri

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

SWANTARA MENERIMA ARTIKEL DAN OPINI DARI LUAR LEMHANNAS RI DAN AKAN DIMUAT APABILA SESUAI DENGAN KEBIJAKAN REDAKSI

Daftar Isi



6 LAPORAN UTAMA Transformasi Lemhannas RI, Memperkokoh Ketahanan Nasional untuk Mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045

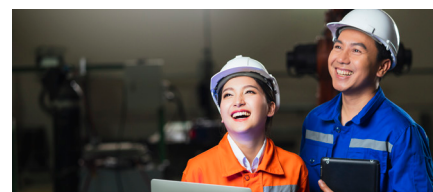
SEPUTAR KITA



10 Gubernur Lemhannas RI Resmi
Membuka Munaslub IKAL-Lemhannas



14 Lemhannas RI Gelar KPPD Ketua
DPRD, Dorong Sinergi Pusat dan
Daerah



18 Lemhannas Dorong Pengelolaan
Sampah Berbasis Komunitas

12 Lemhannas RI dan National War
College AS Bahas Dinamika
Keamanan Kawasan dan Global

17 Lemhannas RI Berbagi Pengalaman
Pengkajian Strategis kepada
Delegasi ICSP Sri Lanka

20 Lemhannas dan KP2MI Perkuat
Peran Pekerja Migran sebagai Duta
Bangsa

SEPUTAR KITA



- 22 Pelatihan Penguatan Integritas dan Antikorupsi Bagi Peserta P3N Angkatan 27 Lemhannas RI
- 24 Lemhannas RI dan Canadian Defence College Bahas Kebijakan dan Modernisasi Pertahanan
- 26 P3N Angkatan 27 Siap Menjadi Pemimpin Strategis Menuju Indonesia Emas 2045

- 28 Lemhannas RI Perkuat Jejaring Kebangsaan Melalui PPNK 118
- 30 Wagub Lemhannas RI Terima Gelar Doktor Honoris Causa Bidang Ilmu Kemaritiman dari Universitas Sam Ratulangi

- 32 Dari Politik Lokal ke Ketahanan Nasional: Strategi Penguatan Pimpinan DPRD guna Mengawal Asta Cita
- 34 Menjaga Ketahanan Ekonomi sebagai Pilar Utama Asta Cita di Tengah Dinamika Geopolitik Global
- 38 Peristiwa pemantik konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran akan terus berlanjut, serta implikasinya terhadap Indonesia

PROFIL PEJABAT

40



Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma...."Lemhannas harus menjadi tempat lahirnya para pemimpin nasional yang memiliki wawasan kebangsaan, memahami sejarah bangsa, dan mampu membaca dinamika geopolitik..."

PROFIL PEGAWAI

44



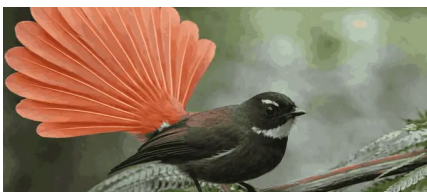
Integritas dan Spiritualitas: Pedoman Sri Yulianti dalam Mengelola Keuangan Negara

HOT NEWS



- 46 Bertemu di Jakarta, RI-Jerman Sepakati Penguatan Investasi dan Tenaga Kerja Terampil
- 47 Mental Juara: Merah Putih Berjaya di Grand Prix Tunisia

RAGAM



- 48 *Camptostemon philippinensis*, Permata Langka Hutan Mangrove
- 49 Sikatan Kipas, Si Mungil yang Bernyanyi di Malam Hari

SUARA PESERTA



- 50 Mengutamakan Kebersamaan, Brigjen Pol. Ade Ary Syam Indradi Raih Predikat Akademik Terbaik P3N Angkatan XXVII
- 51 Mengangkat Potensi Laut Lepas, Laksma TNI Ignatius Bayu Trikuncoro Raih Predikat KKP Terbaik P3N Angkatan XXVII



52 GALLERY

TRANSFORMASI LEMHANNAS RI

Memperkokoh Ketahanan Nasional
untuk Mewujudkan Asta Cita menuju
Indonesia Emas 2045



Pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) yang jatuh pada hari Rabu, 20 Mei 2026, sebuah refleksi mendalam mengenai arah strategis bangsa kembali digaungkan. Dalam Orasi Kebangsaan yang disampaikan oleh Komisariss Jenderal Polisi Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si., Lemhannas RI diajak untuk tidak sekadar merayakan perjalanan Lemhannas RI, melainkan menjadikan momentum ini sebagai pijakan untuk merefleksikan pengabdian sekaligus mendorong penguatan kelembagaan di tengah arus perubahan geopolitik yang bergulir cepat.

Orasi tersebut menyoroti urgensi ketangguhan bangsa yang harus senantiasa dibangun melalui perjuangan, patriotisme, pemikiran negarawan, serta pengabdian tulus di tengah tantangan zaman demi mewujudkan tujuan nasional (*national interest*) sesuai dengan amanat UUD NRI 1945. Indonesia saat ini tengah berada pada titik persimpangan sejarah yang sangat krusial: bangkit menjadi bangsa yang memimpin perubahan, atau justru tertinggal dan tergerus dalam kompetisi global yang kian ketat.

Maka, Lemhannas RI yang didirikan Presiden Soekarno memiliki peran strategis sebagai pusat pengembangan pemikiran ketahanan nasional dan juga harus mampu menjadi pusat rujukan ketahanan nasional bangsa dan Lembaga think tank yang mendorong dan menggagas berbagai konsep dan strategi pada terwujudnya ketahanan nasional.

Dinamika Global dan Visi Geopolitik Para Pendiri Bangsa

Tantangan global yang dihadapi Indonesia saat ini semakin kompleks, dipenuhi dengan ketidakpastian, dan diwarnai oleh berbagai ancaman non-tradisional. Mulai dari disrupsi teknologi, rivalitas geopolitik, ancaman siber, krisis pangan dan energi, perubahan iklim,

hingga krisis global yang mengarah pada terbentuknya tatanan dunia baru (*new world order*). Kondisi ini menuntut Indonesia untuk memiliki daya lentur (*adaptasi*) dan ketahanan nasional (*national resilience*) yang sangat tangguh.

Kesadaran akan kerentanan sekaligus potensi bangsa ini sejatinya telah tertanam kuat dalam pemikiran para Founding Fathers, Lemhannas RI lahir dari kesadaran geopolitik yang mendalam bahwa Indonesia tidak berdiri dalam "ruang strategis hampa". Sebagai Negara Kepulauan Terbesar di Dunia (The Archipelago State), Indonesia bukan sekadar bentangan daratan dan lautan, melainkan entitas strategis yang berada pada titik temu berbagai kepentingan global, diapit oleh dua benua dan dua samudra yang menjadi jalur vital perdagangan dunia.

Posisi geostrategis ini memberikan keunggulan yang luar biasa besar, namun secara bersamaan menghadirkan tantangan dan kerentanan kompleks. Potensi berupa sumber daya alam dan keragaman budaya tidak akan otomatis menjelma menjadi kekuatan nasional tanpa adanya kapasitas kepemimpinan strategis dan tata kelola pemerintahan melalui sistem manajemen nasional yang kuat.

"Dalam konteks inilah kehadiran Lemhannas RI menjadi sangat penting, yakni menjadi institusi strategis yang mendidik dan mempersiapkan serta mengintegrasikan para pemimpin nasional yang berjiwa patriotik dan negarawan," jelas Komisariss Jenderal Polisi Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si.

Atas dasar kesadaran geopolitik pentingnya penguatan ketahanan nasional, Lemhannas RI didirikan pada 25 November 1964 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1964, di tengah dinamika Perang Dingin, sebagai fondasi strategis untuk mewujudkan tujuan nasional.

Hal ini sangat selaras dengan visi Presiden Soekarno saat memberikan

kuliah kepada Peserta KRA (sekarang P4N) pertama pada tanggal 20 Mei 1965. Beliau menegaskan bahwa lembaga pertahanan nasional (sebelum terdapat perubahan nomenklatur menjadi Lembaga Ketahanan Nasional) tidak boleh sekadar menjiplak konsep dari luar, melainkan harus dipahami sebagai upaya menggunakan dan mendasarkan pertahanan atas konstelasi dan karakteristik bangsa sendiri. Presiden Soekarno menekankan:

"Diberi kuliah pengetahuan kepada semua pengikut supaya kita mengetahui dengan benar-benar, tanah air kita, geografi tanah air kita, konstelasi tanah air kita, asal rakyat kita, mentalitas rakyat kita, ekonomi kita, kultur kita, semuanya ini kita olah nanti menjadi bahan untuk menyusun dan menentukan pertahanan nasional kita."

Filosofi "Pohon Ketahanan Nasional" dan Analogi "Gunung Es"

Secara Filosofis, ketahanan nasional merupakan konsep, cara pandang, serta paradigma kebangsaan yang berakar kuat pada empat konsensus dasar bangsa. Dalam orasinya, Komisariss Jenderal Polisi Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si., menyampaikan analogi filosofis yang sangat kuat mengenai Ketahanan Nasional sebagai sebuah "Pohon Ketahanan Nasional".

Di tengah terpaan angin badai geopolitik global, "Pohon" tersebut harus tumbuh kokoh dan tegak berdiri sebagai penyangga utama pelindung bangsa. "Pohon" tersebut akan mampu bertahan, tumbuh, dan berkembang jika memiliki akar yang kuat, batang yang lentur, dan ranting-ranting.

Akar yang kuat mewakili ideologi bangsa yang menancap pada nilai-nilai kebangsaan, mencakup empat konsensus dasar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). Sementara Batang yang Lentur merepresentasikan keluasaan wawasan kebangsaan yang adaptif terhadap berbagai perubahan yang



Sestama Lemhannas RI Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si. memberikan orasi ilmiah pada puncak acara HUT Lemhannas RI

ada. Sedangkan Ranting-ranting mencerminkan kewaspadaan nasional yang tajam untuk membaca, memetakan, dan mengantisipasi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kedaulatan NKRI.

Melalui integrasi filosofis dari seluruh elemen pohon tersebut, bangsa Indonesia harus tetap berdiri tegak berlandaskan nilai kebangsaan yang kuat. Perpaduan antara kekuatan akar ideologi, kelenturan adaptasi, dan ketajaman kewaspadaan inilah yang merupakan esensi sejati dari "Paradigma Ketahanan Nasional", yaitu kemampuan bangsa untuk bertahan, beradaptasi, dan bertransformasi tanpa kehilangan jati diri.

Mengacu pada paradigma ketahanan nasional serta dihadapkan pada tantangan global yang semakin multidimensional, Lemhannas RI perlu terus melakukan transformasi ketahanan nasional. "Ketahanan Nasional harus dikembangkan menjadi paradigma strategis sekaligus living knowledge yang terinternalisasi dalam cara berfikir, sikap, dan tindak para pemimpin bangsa," tegas

Guna mewujudkan transformasi ini, paradigma dalam memetakan persoalan bangsa harus dirombak secara mendasar. Pemahaman terhadap dinamika negara tidak boleh lagi terjebak pada pendekatan Iceberg (Gunung Es) yang sekadar menyentuh gejala permukaan seperti konflik sosial, disinformasi, polarisasi, dan ketimpangan ekonomi. Jauh di bawah permukaan tersebut, akar masalah yang sesungguhnya justru terletak pada pola yang terus berulang, struktur yang belum adaptif, serta cara berpikir yang tertinggal. Oleh karena itu, tantangan terbesar saat ini adalah merombak total cara memahami dan merespons setiap persoalan; meninggalkan pendekatan reaktif jangka pendek dan beralih menuju cara berpikir sistemik, mendalam, proaktif, dan inovatif.

Ketahanan Transformatif menuju Indonesia Emas 2045

Indonesia di masa depan seharusnya tidak hanya menjadi penonton atau rule taker di pinggir sejarah dunia. Bangsa ini harus berani naik kelas menjadi aktor utama yang berkontribusi membentuk aturan main global (rule maker). Untuk meraih posisi tersebut, dibutuhkan

kekuatan ekonomi, penguasaan teknologi, pertahanan yang tangguh, SDM unggul, dan diplomasi yang cerdas.

Visi pembangunan nasional melalui Asta Cita harus dimaknai sebagai manifestasi dari "Ketahanan Transformatif". "Asta Cita bukan sekadar agenda sektoral, melainkan strategi besar untuk mentransformasikan fondasi ketahanan nasional," tegas Komisariss Jenderal Polisi Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si.

Ketahanan transformatif menuntut bangsa untuk bergerak dari pola pikir reaktif menuju pola pikir antisipatif, dari ketergantungan menuju kemandirian, dan dari adaptasi menuju inovasi aktif. Menjawab tuntutan perubahan strategis ini, Lemhannas RI tidak boleh lagi sekadar dilihat sebagai "kawah candradimuka" konvensional, melainkan harus menjadi lembaga think tank puncak pendidikan kepemimpinan nasional.

Untuk mewujudkannya, Lemhannas RI perlu bertransformasi dengan menampilkan lembaga yang adaptif melalui:

1. Transformasi Kelembagaan: Menjadikan institusi yang lebih

agile, responsif, inklusif, dan selalu berbasis data.

2. Transformasi Digital: Mengintegrasikan Artificial Intelligence, Big Data, dan Predictive Analytics dalam sistem operasi kelembagaan.
3. Transformasi Program Pendidikan: Menyiapkan fasilitas pendidikan seperti smart class, serta melakukan penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran kepemimpinan nasional yang relevan dengan tantangan zaman.
4. Transformasi Kajian Strategis: Menghasilkan kajian yang komprehensif, anticipatory, evidence-based, dan policy-oriented sebagai rujukan pimpinan nasional dalam merumuskan kebijakan.
5. Transformasi Jejaring dan Kolaborasi: Memperluas kerja sama strategis dengan berbagai lembaga pemikir, baik di tingkat nasional maupun internasional.
6. Transformasi Peran Strategis: Berperan sebagai Center of Excellence dalam pendidikan kepemimpinan nasional, pendidikan geopolitik, dan ketahanan nasional.

Langkah transformasi di atas menuntut pembaruan yang didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Lemhannas RI 2025–2029 yang telah ditetapkan berdasarkan Pergub No. 12 Tahun 2025 yang bervisi mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

Akselerasi transformasi kelembagaan juga perlu terus dilakukan dengan mengoptimalkan peran Assessment Center Kepemimpinan Nasional yang telah ada saat ini. Pemetaan kualitas dan kompetensi terhadap setiap kader pimpinan nasional pasca-pendidikan wajib dilakukan secara komprehensif.



Pemberian sertifikat apresiasi kepada orator Komjen Pol Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si.

Hasil pemetaan tersebut harus diintegrasikan secara nyata sebagai landasan utama dalam pengembangan karier, penempatan jabatan, serta peningkatan mutu para lulusan di lingkungan kerja mereka masing-masing, sehingga proses manajemen kepemimpinan strategis nasional dapat berjalan di atas sistem meritokrasi yang terukur.

Secara paralel, Lemhannas RI juga harus memperkuat perannya melalui pengembangan kapasitas kelembagaan yang berorientasi pada standardisasi kompetensi nasional agar penguatan ketahanan bangsa tidak lagi berjalan secara sporadis. Langkah strategis yang telah terwujud dan mutlak harus dipertahankan serta ditingkatkan adalah penguatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pengajar Ketahanan Nasional. Kehadiran LSP ini memiliki arti penting dalam menjamin ketersediaan tenaga pendidik yang profesional, terukur, dan memiliki standar kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun kelembagaan, sehingga sistem pendidikan ketahanan nasional dapat berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Hal yang tidak kalah mendasar dan mendesak dalam menyempurnakan seluruh rangkaian transformasi ini adalah memperkuat kerangka regulasi melalui pembentukan Undang-Undang Ketahanan Nasional yang akan menjadi dasar hukum utama bagi pengembangan ekosistem ketahanan bangsa. Kehadiran undang-undang ini menjadi sangat urgen agar paradigma ketahanan nasional tidak lagi sekadar dipahami sebagai wacana doktrinal atau wacana di permukaan semata, melainkan menjelma menjadi arah pijakan yang kokoh dan mengikat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Melalui integrasi pemetaan kepemimpinan yang akurat, standardisasi pengajar yang profesional, serta penguatan regulasi tersebut, Lemhannas RI akan tegak berdiri sebagai motor penggerak dan fondasi utama dalam mengantarkan Indonesia menuju peradaban baru yang tangguh pada era Indonesia Emas 2045. Semangat transformasi inilah yang menjadi komitmen nyata pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun Lemhannas RI ke-61 ini. Dirgahayu Lemhannas RI!

Gubernur Lemhannas RI Resmi Membuka

Munaslub IKAL- Lemhannas

SELAMAT MELAKSANAKAN
MUSYAWARAH NASIONAL
LUAR BIASA IKAL TAHUN 2020



Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL-Lemhannas) di Ruang Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI, Sabtu (11/4). Kegiatan ini mengangkat tema “Memperteguh Soliditas dan Integritas IKAL-Lemhannas untuk Ikut Serta Mengawal Asta Cita”.

Munaslub menjadi forum strategis bagi IKAL-Lemhannas, terutama dalam memperkuat konsolidasi internal. Agenda utama kegiatan ini adalah pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (Ketum DPP) IKAL-Lemhannas.

Gubernur Lemhannas RI menyampaikan apresiasi kepada Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP IKAL-Lemhannas Dr. Ir. Mustafa Abu

Bakar, M.Si. atas penyelenggaraan Munaslub. Ia menegaskan forum ini berperan dalam menjaga kesinambungan organisasi, menyusul pengunduran diri Ketua Umum periode 2020–2025, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar.

Munaslub diharapkan tidak hanya menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi juga memperkuat kembali soliditas organisasi di

tengah perbedaan persepsi yang berkembang.

“Mari kita jadikan Munas Luar Biasa ini menjadi sarana utama untuk memilih Ketua Umum Ikal selama 5 (lima) tahun ke depan yang mampu membawa organisasi Ikal ke arah yang lebih baik,” kata Gubernur Lemhannas RI.

Ia juga meminta seluruh peserta mengikuti proses musyawarah dengan kepala dingin dan kejujuran berpikir, serta mengutamakan kepentingan organisasi.

Gubernur Lemhannas RI sebelumnya menyoroti dinamika geopolitik global yang mempengaruhi Indonesia, mulai dari konflik antarnegara, perang dagang, hingga disrupsi teknologi dan perubahan iklim. Dalam situasi tersebut, Indonesia

dituntut memperkuat kemandirian nasional sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto.

Kemandirian tersebut mencakup sektor pangan, ekonomi, dan energi yang ditopang oleh sumber daya manusia unggul. Dalam hal ini, alumni Lemhannas diharapkan berperan sebagai bagian dari kepemimpinan nasional yang menjaga ketahanan negara.

Sebagai alumni pendidikan Lemhannas RI, anggota IKAL-Lemhannas merupakan kader pemimpin nasional yang dituntut memiliki karakter negarawan, integritas, profesionalisme, serta kemampuan berpikir holistik, integral, dan komprehensif. Mereka juga diharapkan mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan kepentingan.

Karena itu, peserta Munaslub diminta mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan kelompok dalam menentukan kepengurusan lima tahun ke depan.

Menutup sambutannya, Gubernur Lemhannas RI berharap Munaslub dapat menghasilkan kepemimpinan yang mampu memperkuat organisasi dan sejalan dengan tujuan Lemhannas RI serta program pemerintah. Ketua umum terpilih diharapkan mampu merangkul seluruh anggota dan menjaga soliditas organisasi.

“Mari kita jaga nama besar almamater, karena apapun yang kita lakukan dan hasilkan melalui Munaslub ini, dapat berdampak pada eksistensi Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia,” pungkas Gubernur Lemhannas RI.

MUNASLUB LEMHANNAS RI
LUAR BIASA IKAL TAHUN 2026





Lemhannas RI dan National War College AS Bahas

Dinamika Keamanan Kawasan dan Global

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menerima kunjungan delegasi National War College Amerika Serikat di Ruang Nusantara II, Rabu (15/4). Kunjungan ini difokuskan pada dialog strategis terkait keamanan nasional, geopolitik kawasan, dan dinamika hubungan internasional di tengah perubahan global yang semakin kompleks. Delegasi diterima oleh Tenaga Profesional Bidang Geopolitik Lemhannas RI Edy Prasetyono, S.Sos., MIS., Ph.D.

Dalam sesi awal, delegasi menjelaskan bahwa National War College merupakan program pendidikan satu tahun yang dirancang untuk membentuk perwira dan pejabat pemerintah menjadi pemikir strategis. Kurikulum tidak hanya menitikberatkan pada aspek militer, tetapi juga mencakup diplomasi, ekonomi, dan kebijakan publik sebagai bagian dari instrumen kekuatan negara.

Diskusi kemudian mengarah pada konsep keamanan nasional Indonesia yang menempatkan keamanan sebagai isu multidimensi. Pendekatan ini tidak terbatas pada pertahanan militer, tetapi mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Implementasinya tercermin dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

Indonesia juga menegaskan posisinya dalam percaturan global sebagai negara yang tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu, dengan tetap mengedepankan kemandirian dan kepentingan nasional.

Isu demokratisasi turut menjadi perhatian dalam diskusi. Pasca Reformasi 1998, Indonesia dinilai berhasil bertransisi dari sistem terpusat menuju demokrasi yang lebih terbuka, termasuk dalam penataan hubungan sipil-militer. Peran militer kini difokuskan pada fungsi pertahanan negara secara profesional.

Namun, perdebatan mengenai peran militer di ruang sipil masih berlangsung, terutama terkait persepsi publik dan isu hak asasi manusia. Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa keterlibatan militer dalam institusi sipil diposisikan sebagai penugasan berbasis kebutuhan dan kompetensi, bukan sebagai kembalinya dwifungsi.

Pembahasan juga mencakup tantangan struktural pembangunan pertahanan, seperti keterbatasan

anggaran, kebutuhan modernisasi alutsista, serta penguatan industri pertahanan dalam negeri. Kondisi ini menuntut strategi yang adaptif agar peningkatan kapasitas militer tetap sejalan dengan kemampuan sumber daya nasional.

Dinamika global turut menjadi fokus, khususnya persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang memengaruhi stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Indonesia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan internasional tanpa mengorbankan kedaulatan nasional.

Selain itu, perkembangan teknologi strategis seperti siber dan ruang angkasa semakin berperan dalam sistem pertahanan modern. Indonesia menilai peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kerja sama internasional menjadi kunci untuk menghadapi tantangan tersebut.

Delegasi Amerika Serikat menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan Indonesia, khususnya dalam konsolidasi demokrasi, stabilitas nasional, dan peran aktif dalam kerja sama internasional.

“Kerja sama pendidikan militer merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan pertahanan antara Amerika Serikat dan Indonesia,” ujar perwakilan delegasi National War College.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan cendera mata dari delegasi Amerika Serikat kepada Lemhannas RI sebagai simbol penguatan hubungan bilateral.

Pertemuan ini menunjukkan upaya memperluas pemahaman bersama terkait tantangan keamanan global, sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai aktor yang adaptif dan mandiri dalam menghadapi dinamika geopolitik.



Lemhannas RI Gelar KPPD Ketua DPRD, Dorong Sinergi Pusat dan Daerah

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menyelenggarakan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua DPRD se-Indonesia di Akademi Militer, 15–19 April 2026. Kegiatan dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. pada Kamis (16/4), setelah upacara penyambutan sehari sebelumnya.

Sebanyak 503 peserta mengikuti program ini, terdiri dari Ketua DPRD

provinsi, kabupaten, dan kota, serta pengurus asosiasi DPRD kabupaten. Kegiatan mengangkat tema “Memperkuat Peran Pimpinan DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota Guna Mendukung Asta Cita Menyongsong Indonesia Emas 2045”.

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI menyoroti meningkatnya ketidakpastian global yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan arah pembangunan nasional. Kondisi ini menuntut kepemimpinan daerah yang

tidak hanya administratif, tetapi mampu membaca dinamika geopolitik dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan daerah.

Ia menegaskan bahwa visi Asta Cita yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto dalam RPJMN 2025–2029 harus diimplementasikan secara nyata melalui kebijakan lintas sektor. DPRD diposisikan sebagai aktor kunci dalam memastikan keterhubungan antara agenda nasional dan pelaksanaan di daerah.



“Di tengah dinamika yang semakin kompleks, pimpinan DPRD dituntut untuk tidak hanya menjadi pengelola kebijakan, tetapi juga arsitek perubahan yang mampu menjembatani kebijakan pusat dan daerah, merajut kolaborasi lintas sektor, serta memastikan bahwa pembangunan berjalan secara inklusif dan berkeadilan,” ujar Gubernur Lemhannas RI.

KPPD dirancang sebagai ruang penguatan kapasitas sekaligus konsolidasi kepemimpinan daerah. Program ini tidak hanya membahas aspek kepemimpinan, tetapi juga membangun kesamaan perspektif

kebangsaan, disiplin, serta orientasi kebijakan yang selaras dengan prioritas nasional.

Selama lima hari, peserta menerima materi dari narasumber Lemhannas RI, kementerian, dan lembaga negara. Topik yang dibahas mencakup sejarah kebangsaan, wawasan nusantara, ketahanan nasional, hubungan kelembagaan legislatif, hingga kebijakan strategis di bidang pangan, energi, ekonomi, dan pelayanan publik.

Kegiatan ini juga menjadi forum untuk memperkuat koordinasi antar pimpinan DPRD, sekaligus mendorong

penyelarasan kebijakan daerah dengan agenda pembangunan nasional yang berbasis Asta Cita.

Sejumlah pejabat turut hadir, antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, serta pejabat TNI-Polri dan Lemhannas RI.

Melalui KPPD ini, Lemhannas RI menempatkan penguatan peran DPRD sebagai bagian dari upaya memperkuat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.



Ayo Sampaikan
**Aspirasi & Pengaduan
Pelayanan Publik**

Anda melalui:



TENTANG L

www.lapor.go.id



MASUK

DAFTAR

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Sampaikan laporan Anda langsung kepada instansi pemerintah berwenang

Sampaikan Laporan Anda

Pilih Klasifikasi Laporan

PENGADUAN

ASPIRASI

LAMARAN INFORMASI

Perhatikan Cara Menyampaikan Pengaduan Yang P



Lemhannas RI Berbagi Pengalaman Pengkajian Strategis kepada Delegasi ICSP Sri Lanka

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menerima kunjungan peserta International Collaborative Study Programme (ICSP) National Defence College (NDC) Sri Lanka di Ruang Nusantara II, Kamis (4/6). Kunjungan ini menjadi sarana berbagi pengalaman mengenai pengkajian strategis dan pembangunan ketahanan nasional sebagai bagian dari penguatan kerja sama antarlembaga pendidikan strategis.

Kegiatan diawali dengan pemutaran video profil Lemhannas RI, dilanjutkan pemaparan bertajuk *Strategic Guardians: Comparing National Security Frameworks*. Dalam pemaparannya, Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI, Ir. Edi Permadi, menjelaskan peran National Defence College (NDC) dalam pendidikan pertahanan dan kepemimpinan strategis serta Institute of National Security Studies (INSS) sebagai pusat kajian kebijakan keamanan di Sri Lanka. Sementara itu, Lemhannas RI mengembangkan pendekatan

yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan aspek ideologi, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, geografi, demografi, serta sumber daya alam dalam kerangka ketahanan nasional.

Pada sesi diskusi, peserta memperoleh penjelasan mengenai proses pengkajian strategis di Lemhannas RI yang melibatkan kementerian, lembaga pemerintah, unsur pertahanan dan keamanan, akademisi, serta peserta program pendidikan. Hasil pengkajian tersebut kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi strategis yang dapat disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.

Edi Permadi menjelaskan bahwa penyusunan rekomendasi dilakukan melalui berbagai forum diskusi dan focus group discussion (FGD) untuk menghimpun berbagai perspektif sehingga menghasilkan rekomendasi yang komprehensif. "Kami tidak bekerja sendiri, tetapi mengundang berbagai instansi pemerintah terkait untuk berdiskusi, mengonsolidasikan gagasan, dan menyusun rekomendasi secara bersama-sama,"

ucap Edi Permadi.

Diskusi juga membahas tantangan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis, demografi, dan sosial budaya yang beragam. Dalam konteks tersebut, pembangunan kepemimpinan nasional dan penguatan ketahanan nasional menjadi faktor penting dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis global.

Selain membahas mekanisme pengkajian strategis, forum ini juga menyoroti perbedaan pendekatan Indonesia dan Sri Lanka dalam membangun keamanan nasional. NDC dan INSS berfokus pada aspek keamanan, sedangkan Lemhannas RI mengintegrasikan berbagai dimensi kehidupan nasional dalam konsep ketahanan nasional. Pendekatan tersebut menjadi salah satu karakteristik Lemhannas RI dalam merumuskan rekomendasi strategis yang mendukung pengambilan kebijakan nasional.



Lemhannas Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas

Persoalan sampah yang terus meningkat dan belum tertangani secara optimal dinilai memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari solusi. Untuk membahas hal tersebut, Kedeputan Pengkajian Strategik Lemhannas RI menyelenggarakan Focus Group



Discussion (FGD) Kajian Urgent dan Cepat bertema “Revitalisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas untuk Meningkatkan Nilai Tambah dalam Rangka Penguatan Ketahanan Nasional” di Ruang Kresna pada Kamis (30/4).

FGD dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi kondisi, tantangan, dan potensi pengelolaan sampah berbasis komunitas guna meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendukung ketahanan nasional.

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI menegaskan bahwa persoalan sampah telah berkembang menjadi isu global yang semakin kompleks. Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, dan pola konsumsi masyarakat mendorong meningkatnya timbulan sampah yang membutuhkan penanganan lebih terintegrasi.

Di Indonesia, persoalan sampah masih menjadi tantangan besar. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan sebagian besar sampah nasional masih belum terkelola secara optimal dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan maupun sosial.

“Saya berharap diskusi ini memiliki dan menghasilkan rekomendasi strategis, tidak hanya pada level aksi pemerintah

tapi juga bisa mendorong semua pihak untuk terlibat dalam meningkatkan atau melakukan revitalisasi pengelolaan sampah berbasis komunitas sehingga memiliki nilai tambah yang dapat memperkuat ketahanan nasional kita,” kata Gubernur Lemhannas RI.

FGD yang difasilitasi Direktur Pengkajian Sosial Budaya dan Demografi Brigjen Pol Yusuf Hondawantri Naibaho, S.H., M.Si., M.H. menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian, pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi.

Plt. Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup RI Dra. Melda Mardalina, M.Sc. menjelaskan bahwa pemerintah tengah mendorong transisi sistem pengelolaan sampah berbasis sumber melalui pendekatan hulu dan hilir yang terintegrasi.

“Jadi bapak ibu sekalian, apa yang menjadi target utama dalam revitalisasi ini kita bergerak dari apa yang sudah ditetapkan Bapak Presiden melalui Perpres No.12 Tahun 2025,” kata Melda Mardalina.

Melalui FGD ini, Lemhannas RI berharap dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya memperkuat pengelolaan sampah berbasis komunitas, tetapi juga mendorong terciptanya nilai tambah ekonomi dan penguatan ketahanan nasional secara berkelanjutan.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Lemhannas dan KP2MI Perkuat Peran Pekerja Migran sebagai Duta Bangsa

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) RI di Ruang Konstitusi, Gedung Trigatra, pada Selasa (5/5). Nota kesepahaman tersebut dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dan bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua pihak.

“Kegiatan ini merupakan wujud komitmen bersama baik Lemhannas RI dan KP2MI dalam membangun kolaborasi melalui berbagai program-program kegiatan bersama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam mewujudkan tujuan nasional serta menjalankan program pemerintah,” ujar Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. mengawali sambutannya. Kolaborasi tersebut dalam rangka memperkuat ketahanan nasional guna mewujudkan tujuan nasional yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo.

Dikatakan oleh Gubernur Lemhannas RI, pekerja migran Indonesia merupakan gambaran sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul sesuai yang diamanatkan dalam asta cita. Di tengah tantangan dinamika geopolitik global, Indonesia membutuhkan SDM yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis dan berdaya saing global, tetapi juga SDM yang





memiliki karakter kebangsaan dan jiwa nasionalisme yang kuat dan tangguh dengan pemahaman ketahanan nasional yang kokoh.

Nota kesepahaman yang ditandatangani antara Lemhannas RI dan KP2MI RI meliputi peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan kepemimpinan dan pelatihan program pematapan nilai-nilai kebangsaan, penyelenggaraan kegiatan ilmiah dan kajian kebijakan strategis, serta pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi. Dalam konteks kerja sama dengan KP2MI saat ini, program terdekat yang akan direncanakan adalah pembekalan kepada para pekerja migran Indonesia.


“Ada kurikulum khusus yang disusun Lemhannas, singkat tapi bisa menyentuh nasionalisme pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri tentang nilai-nilai kebangsaan, karena mereka merupakan “duta bangsa” yang berkibrah di luar negeri,” jelas Gubernur Lemhannas RI. Selain itu, juga diupayakan peluang kerja sama di bidang lain, seperti pengkajian bersama tentang kebijakan perlindungan dan penempatan para pekerja migran Indonesia serta pengiriman pejabat di lingkungan KP2MI untuk mengikuti pendidikan P3N/P4N Lemhannas RI.

Menteri KP2MI RI Mukhtarudin turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Lemhannas RI atas upaya yang akan dilakukan bersama dalam menyukseskan program prioritas nasional. Mukhtarudin berharap pekerja migran Indonesia dapat diberikan pemahaman kebangsaan agar rasa cinta tanah air dan nasionalismenya tidak luntur dan tidak terdistorsi oleh budaya, ideologi, dan pemahaman negara lain yang dihadapi selama berada di luar negeri.



PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL

Pelatihan Penguatan Integritas dan Antikorupsi Bagi Peserta P3N Angkatan 27 Lemhannas RI



Lemhannas RI menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Penguatan Integritas dan Antikorupsi Bagi 84 Peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan ke 27 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Bhinneka Tunggal Ika pada Senin (18/5).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. terkait pentingnya integritas dalam mengelola sebuah negara. “Ada satu hal yang saya kira paling fundamental untuk bisa memastikan agar bagaimana negara bisa hadir mengelola manajemen pemerintahannya dengan baik dan satu hal yang paling fundamental adalah membangun integritas,” kata Gubernur Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas RI juga menyampaikan bahwa adanya workshop ini diharapkan dapat menjadi titik awal sebagai pemimpin-pemimpin bangsa untuk membangun integritas dan membangun karakter antikorupsi yang merupakan suatu hal penting untuk ditanamkan sebagai bagian yang mendasari pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Kemudian, materi disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Prof. Agus Joko Pramono tentang Indonesia dan strategi pemberantasan korupsi. Menurut Agus, anatomi korupsi di Indonesia ada empat, meliputi revenue markdown, expense markup, asset misuse, dan authority abuse. Menurut Survei Penilaian Integritas (SPI) pada tahun 2025, Indeks Integritas Nasional mencapai angka 72,32 yang menunjukkan

adanya perubahan namun belum menyentuh akar permasalahannya.

Sebagai lembaga pemberantas korupsi yang memiliki visi untuk bersama mewujudkan negara antikorupsi menuju Indonesia Emas 2045, KPK andil dalam strategi nasional pencegahan korupsi di Indonesia. “Ada satu yang saya sampaikan prinsip penegakan hukumnya, yang namanya pemberantasan korupsi itu harus in line dengan pembangunan. Mengapa? Karena pembangunan itu adalah tugas negara, sedangkan korupsi itu adalah penghambat pembangunan. Jadi, pemberantasan korupsi tidak boleh terjadi dengan menghambat pembangunan,” kata Agus.

Lebih lanjut, materi disampaikan oleh Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Dr. Wawan Wardiana tentang dampak dan biaya sosial korupsi, jenis dan delik tindak pidana korupsi serta business judgement rules, dan peran pimpinan dalam menghadapi godaan dan dilema integritas. Berdasarkan kajian KPK, besaran pembebanan biaya sosial terhadap terpidana korupsi besarnya dapat mencapai 4 kali hingga 453 kali lipat dibandingkan hukuman finansial yang diberikan pengadilan kepada terpidana.

Jenis-jenis korupsi ada 3, yakni petty corruption, grand corruption dan political corruption/ state capture corruption. Menurut data kasus yang ditangani oleh KPK, kasus korupsi terbanyak adalah dalam bentuk gratifikasi dan penyuapan. Sebagai pemimpin, mempertahankan integritas dinilai sangat penting untuk menjadi tauladan. “Karena integritas itu bukan sesuatu yang didapatkan

dengan given, itu tidak, itu dilatih, kemudian diuji, seseorang itu akan teruji integritasnya kalau melalui beberapa hal. Tidak mungkin tiba-tiba karena integritas itu sesuatu yang terus menerus diupayakan,” ujar Wawan.

Gubernur Lemhannas RI mengikuti kegiatan Pelatihan Penguatan Integritas dan Antikorupsi bagi peserta P3N 27 pada hari kedua di Gedung Rupbasan KPK, pada Selasa (19/5). Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI disambut langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dan dilanjutkan dengan meninjau barang-barang sitaan KPK.

Fitroh dalam kesempatan tersebut menekankan kepada peserta agar peserta P3N 27 memiliki dasar integritas, dedikasi, objektif, loyalitas dan amanah yang disebut IDOLA. Hal tersebut bertujuan agar peserta mampu menjadi pemimpin yang MESRA, yakni Melayani, Empati, Sepenuh hati, Ramah, dan Antusias. “Mudah-mudahan, pendidikan di Lemhannas RI benar-benar diajarkan untuk menjadi pemimpin,” ujarnya.

Gubernur Lemhannas RI juga menyampaikan bahwa tidak ada bangsa yang besar dan kuat jika integritas moral tidak dimiliki oleh para penyelenggaranya. Selain itu, Gubernur Lemhannas RI berharap melalui kegiatan tersebut dapat meyakinkan peserta pendidikan Lemhannas RI untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan antikorupsi menuju good governance.

Lemhannas RI dan Canadian Defence College Bahas Kebijakan dan Modernisasi Pertahanan



Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menerima kunjungan delegasi Canadian Defence College di Ruang Nusantara II, Rabu (22/4). Delegasi dipimpin Kolonel David Shayne Elder dan diterima oleh Tenaga Profesional Bidang Geopolitik Lemhannas RI Edy Prasetyono, S.Sos., MIS., Ph.D.

Pertemuan membahas lingkungan strategis serta arah modernisasi pertahanan Kanada. Delegasi menjelaskan bahwa kebijakan keamanan Kanada sangat dipengaruhi oleh faktor geografis, demografi, ekonomi, dan hubungan internasional.

Secara geografis, Kanada memiliki wilayah luas dengan garis pantai panjang yang berbatasan dengan Samudra Arktik, Atlantik, dan Pasifik. Namun, distribusi penduduk tidak merata. Sekitar 90 persen populasi tinggal dekat perbatasan Amerika Serikat dan terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam pengelolaan wilayah, terutama di kawasan utara.

Dari sisi ekonomi, Kanada termasuk negara dengan ekonomi besar yang bergantung pada perdagangan internasional. Sekitar 65 persen Produk Domestik Bruto (PDB) terkait aktivitas perdagangan, sehingga stabilitas jalur ekonomi global menjadi kepentingan strategis.

"Geografi dan ekonomi Kanada secara langsung membentuk cara negara ini memahami keamanan dan menentukan arah kebijakan pertahanannya," ujar David.

Dalam aspek politik, Kanada menganut sistem monarki konstitusional dengan pemerintahan yang stabil. Perdana Menteri berasal dari partai dengan kursi terbanyak di parlemen federal. Militer tidak terlibat dalam politik, dan kebijakan pertahanan berada di bawah otoritas sipil.

Seiring dinamika global, Kanada meningkatkan modernisasi pertahanan melalui investasi pada Canadian Armed Forces. Sektor pertahanan negara tersebut mencakup sekitar 600 perusahaan dan berkontribusi lebih dari 9,6

miliar dolar AS terhadap PDB serta menyerap sekitar 81.200 tenaga kerja.

Dalam diskusi, Edy Prasetyono menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan global.

"Kerja sama tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga harus mencakup dimensi budaya, politik, dan ekonomi," ujarnya.

Pertemuan ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan saat ini semakin bergeser ke arah multidimensi, tidak hanya berbasis kekuatan militer, tetapi juga pada faktor struktural dan kolaborasi lintas sektor.

Pada kesempatan tersebut, Edy Prasetyono didampingi oleh Tenaga Ahli Pengajar Madya Bidang Hubungan Internasional Brigjen TNI (Mar) Raja Erjan H.S. Girsang, S.E., M.M., M.Sc., Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bidang Pertahanan dan Keamanan Brigjen TNI Agus Muchlis Latif, S.I.P., M.M., dan perwakilan peserta pendidikan P4N 69 Lemhannas RI.



"Geografi dan ekonomi Kanada secara langsung membentuk cara negara ini memahami keamanan dan menentukan arah kebijakan pertahanannya."

Kolonel David Shayne Elder

P3N Angkatan 27 Siap Menjadi Pemimpin Strategis Menuju Indonesia Emas 2045

“Lembaga berharap besar dengan lahirnya calon pemimpin nasional yang akan menjadi ujung tombak negara yang kita cintai ini di masa depan,”

Seru Gubernur Lemhannas RI Drs. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. saat penyelenggaraan upacara penutupan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) 27 bertempat di Ruang Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI, pada Kamis (4/6). Pada kesempatan tersebut, peserta yang berjumlah 84 orang, telah menyelesaikan pendidikannya selama 3,5 bulan dengan aman dan lancar.

Gubernur Lemhannas RI meyakini, melalui pendidikan pemantapan pimpinan nasional, peserta telah ditempa untuk



menjadi bagian dari solusi bangsa, menjadi perekat persatuan, menjadi agen perubahan, dan menjadi pemimpin yang mampu mengantarkan Indonesia menuju visi besar Indonesia emas 2045. Sejalan dengan hal tersebut, Lemhannas RI berperan penting membentuk pemimpin yang berkarakter, berintegritas, berwawasan kebangsaan, serta memiliki ketajaman analisis strategis.

Selepas menjalankan pendidikan di Lemhannas RI, peserta akan menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks di penugasannya masing-masing. Gubernur Lemhannas RI berharap peserta mampu memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dengan bekal pengetahuan dan pengalaman selama pendidikan, serta nilai persahabatan dan jejaring yang terbentuk.

Adapun lima pesan yang disampaikan Gubernur Lemhannas RI kepada seluruh alumni P3N 27. Pertama adalah para alumni P3N 27 diharapkan menjadi pemimpin nasional yang memiliki integritas, karakter kebangsaan, dan keteguhan moral dalam menjalankan tugas dan pengabdian di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Lalu yang kedua, para alumni diharapkan mampu menjadi pemimpin yang adaptif dan visioner dalam menghadapi perubahan global, seperti perkembangan geopolitik, disrupsi teknologi, artificial intelligence, ekonomi digital, dan ancaman siber.

Kemudian yang ketiga adalah para alumni P3N 27 harus menjadi perekat persatuan dan penjaga kohesi nasional, memiliki rasa empati dan kepekaan sosial yang tinggi guna menjaga persatuan, merawat keberagaman, serta mencegah polarisasi dan konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Pada pesan keempat, Gubernur Lemhannas RI menyoroti tentang kepekaan strategis para alumni terhadap berbagai tantangan nasional dan global. Menurutnya, pemimpin nasional harus mampu membaca perubahan, mengantisipasi risiko, dan menyiapkan langkah-langkah strategis bagi masa depan bangsa.

Lebih lanjut, pada pesan kelima Gubernur Lemhannas RI mendorong para alumni P3N 27 untuk terus bekerja sama, berkoordinasi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan nasional dan

menghilangkan ego sektoral. “Jejaring strategis antarlembaga, antarsektor, dan antargenerasi sangat penting dalam memperkuat kolaborasi nasional guna mendukung terwujudnya Indonesia emas 2045,” tegasnya.

Pada penyelenggaraan acara tersebut, diumumkan penetapan penerima penghargaan. Penghargaan Predikat Akademik Terbaik dengan akumulasi nilai akademik tertinggi diberikan kepada Brigjen Pol. Ade Ary Syam Indradi, S.H., S.I.K., M.H. Penghargaan selanjutnya dengan kategori predikat kertas kerja perorangan (KKP) terbaik diberikan kepada Laksma TNI Ignatius Bayu Trikuncoro, S.E., M.M., CHRMP.

Menutup sambutannya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya serta ucapan selamat kepada seluruh alumni P3N 27 yang telah menunjukkan kerja keras, disiplin, dedikasi, serta semangat belajar yang tinggi di tengah rangkaian kegiatan yang padat dan penuh tantangan. “Semangat inilah yang mencerminkan kesiapan saudara-saudara untuk menjadi pemimpin yang tangguh, berintegritas, dan visioner,” pungkas Gubernur Lemhannas RI.



PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN

Lemhannas RI Perkuat Jejaring Kebangsaan Melalui PPNK 118



"Kehadiran para peserta hari ini adalah bukti nyata kesadaran kolektif kita bahwa kekuatan bangsa terletak pada persatuan dan kerjasama lintas sektor."

Kata Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M. Si. Hal tersebut disampaikan dalam Upacara Pembukaan Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan ke-118 Kolaboratif Lemhannas RI pada Selasa (2/6).

Sebanyak 103 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut berasal dari anggota Indonesia Financial Group (IFG), anggota Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI), anggota Asosiasi Logistik dan Frowarder Indonesia (ALFI), dan anggota Keamanan dan Keselamatan Indonesia (KAMSELINDO), dan anggota International Full Gospel Fellowship (IFGF).

Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI menilai bahwa keberagaman latar belakang dan bidang kerja dari masing-



masing organisasi tersebut justru menjadi kekuatan utama. Menurut Gubernur Lemhannas RI, visi, misi, dan potensi yang dimiliki dapat disatukan guna membangun pondasi yang kokoh bagi persatuan dan kesatuan bangsa. "Kolaborasi ini bukan sekadar pertemuan antar organisasi dan pelaku usaha, melainkan sebuah langkah strategis untuk memastikan bahwa nilai-nilai luhur kebangsaan tetap hidup, terjaga, dan terus ditanamkan dalam setiap langkah kerja kita," ucap Gubernur Lemhannas RI.

Kegiatan tersebut mengusung tema besar "Memperkokoh Nilai-Nilai Kebangsaan dengan Meningkatkan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045". Tema tersebut dinilai diperlukan

karena kondisi Indonesia yang saat ini berdiri di persimpangan jalur geopolitik dunia yang semakin dinamis, kompetitif, dan penuh tantangan. Posisi strategis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra, tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pusat pertemuan kepentingan kekuatan besar dunia, namun juga memberi peluang emas untuk menjadi penyeimbang dan kekuatan utama kawasan. Ditengah kondisi tersebut, nilai-nilai kebangsaan menjadi jangkar terkuat agar Indonesia tidak terombang-ambing, tidak terpecah belah, dan tetap berjalan di jalan lurus kepentingan nasional.

"Sinergi antara IFG, HKPI, KAMSELINDO, IFGF, dan ALFI serta pelaku usaha bukan sekadar

pertemuan organisasi, melainkan penyatuan potensi untuk menjawab tantangan zaman dan mendukung penuh cita-cita besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045," ujar Gubernur Lemhannas RI. Diharapkan kegiatan ini akan kembali memantapkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai luhur bangsa, kemudian menjadi kekuatan nyata melalui kolaborasi lintas sektoral.

Turut hadir pada Upacara Pembukaan PPNK Angkatan ke-118 Kolaboratif Lemhannas RI, yakni Direktur SDM IFG Rizal Ariansyah; Ketua Umum HKPI H. Martin Erwan; Ketua Umum ALFI Akbar Djohan; Ketua Umum KAMSELINDO Dr. Kyatmaja Lookman; dan Ketua Umum IFGF Semijaya Hartanto.

Wagub Lemhannas RI Terima Gelar Doktor Honoris Causa Bidang Ilmu Kemaritiman dari Universitas Sam Ratulangi

Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Laksamana

Madya TNI Erwin S. Aldedharma, S.E., M.M., M.Sc., menerima gelar Doktor Honoris Causa (Dr. H.C.) bidang Ilmu Kemaritiman dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) dalam Sidang Senat Terbuka yang diselenggarakan di Auditorium Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Jumat (19/6).

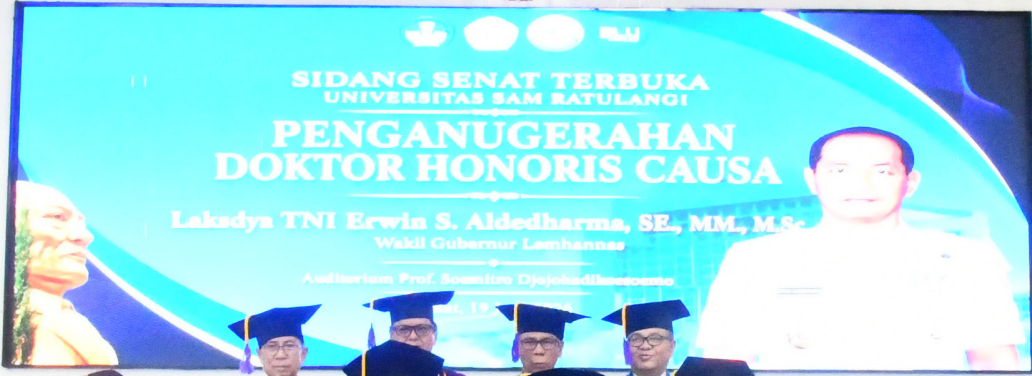
Penganugerahan tersebut dipimpin oleh Rektor Universitas Sam Ratulangi, Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, M.Eng., IPU, ASEAN Eng. Gelar kehormatan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Erwin S. Aldedharma dalam pengembangan kemaritiman nasional, kepemimpinan strategis, serta penguatan wawasan kebangsaan.

Selama bertugas sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Laut, Erwin S. Aldedharma mengemban berbagai jabatan strategis, di antaranya Panglima Komando Armada I,

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut, hingga kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Lemhannas RI. Kontribusinya melalui kepemimpinan operasi laut, pembinaan kekuatan TNI Angkatan Laut, diplomasi maritim, serta penguatan tata kelola organisasi dinilai memberikan dampak positif bagi pengembangan sektor kemaritiman nasional.

Penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa tersebut menjadi bentuk pengakuan akademik atas kontribusi Erwin S. Aldedharma dalam memperkuat pembangunan kemaritiman sekaligus mendukung pengembangan kepemimpinan strategis dan wawasan kebangsaan.

Di sela rangkaian kunjungan di Kota Manado, Erwin S. Aldedharma juga mengunjungi Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Didampingi Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VIII, Laksamana Pertama TNI May Franky Pasuna Sihombing, ia diterima oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H.





Dari Politik Lokal ke Ketahanan Nasional: Strategi Penguatan Pimpinan DPRD guna Mengawal Asta Cita

Dr. Dadang Solihin, S.E., M.A.

Tenaga Profesional Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI

Latar Belakang

Transformasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pemerintah pusat, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan di daerah, khususnya pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Dalam konteks ini, Asta Cita Presiden RI sebagai arah strategis pembangunan nasional menuntut adanya sinkronisasi kebijakan lintas level pemerintahan, termasuk pada level legislatif daerah. Pimpinan DPRD memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik, memastikan kualitas tata kelola pemerintahan, serta menjembatani kepentingan rakyat dengan kebijakan publik di daerah.

Namun, realitas menunjukkan bahwa kapasitas pimpinan DPRD masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Masyarakat merasakan bahwa fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan belum sepenuhnya optimal dalam menjawab kebutuhan rakyat dan dinamika pembangunan. Hal ini diperkuat oleh fenomena rendahnya kualitas Perda, keterlambatan pengesahan APBD, serta lemahnya fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik.

Dengan menggunakan pendekatan Iceberg Theory, permasalahan tersebut tidak hanya terlihat pada permukaan (misalnya rendahnya kinerja legislasi), tetapi memiliki akar yang lebih dalam,

seperti keterbatasan kapasitas analisis kebijakan, dominasi kepentingan politik jangka pendek, serta lemahnya integritas dan orientasi kebangsaan. Di lapisan terdalam, terdapat persoalan paradigma kepemimpinan yang belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan nasional.

Selain itu, kompleksitas aktor dalam tata kelola daerah juga memperumit pengambilan keputusan. DPRD tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan pemerintah daerah, partai politik, LSM, dan masyarakat. Struktur ini menunjukkan adanya arena kompetisi kepentingan yang memerlukan kemampuan strategis dalam membangun kolaborasi.

Dalam konteks ini, Lemhannas RI mengambil peran strategis melalui penyelenggaraan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang dilaksanakan pada 15-19 April 2026 sebagai instrumen penguatan kapasitas pimpinan DPRD. Program yang dilaksanakan di kawasan Akademi Militer Magelang ini dirancang untuk membangun karakter negarawan, memperkuat wawasan kebangsaan, serta meningkatkan pemahaman terhadap lingkungan strategis dan implementasi Asta Cita.

Dengan demikian, penguatan kapasitas pimpinan DPRD bukan sekadar kebutuhan teknokratis, tetapi merupakan bagian integral dari strategi memperkokoh ketahanan nasional melalui penguatan pilar demokrasi di daerah.

Pembahasan

Pendekatan Iceberg Theory membantu mengidentifikasi tiga lapisan utama permasalahan dalam kapasitas pimpinan

DPRD. Pada level permukaan, terlihat masalah seperti rendahnya produktivitas legislasi dan lemahnya pengawasan. Pada level tengah, terdapat keterbatasan kompetensi teknis, minimnya dukungan riset, serta kurangnya sistem umpan balik dari masyarakat. Sementara pada level terdalam, terdapat persoalan budaya politik yang masih transaksional serta orientasi kekuasaan yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat.

Dalam kerangka Game Theory, hubungan antaraktor dalam pemerintahan daerah dapat dipahami sebagai interaksi strategis antara DPRD, kepala daerah, partai politik, dan masyarakat. DPRD sering berada dalam dilema antara loyalitas kepada partai politik dan tanggung jawab terhadap konstituen. Jika tidak dikelola dengan baik, interaksi ini dapat menghasilkan “non-cooperative equilibrium”, di mana kebijakan publik tidak optimal.

Sebaliknya, jika pimpinan DPRD memiliki kapasitas kepemimpinan strategis, maka

dapat tercipta “cooperative equilibrium” yang menghasilkan kebijakan sinergis antara pusat dan daerah. Dalam konteks ini, pimpinan DPRD harus mampu memainkan peran sebagai mediator kepentingan, bukan sekadar aktor politik.

Penguatan kapasitas ini menjadi semakin penting dalam mendukung implementasi Asta Cita, yang mencakup berbagai sektor strategis seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga pertahanan dan keamanan. Materi KPPD menunjukkan bahwa pimpinan DPRD perlu memahami isu-isu geopolitik, ketahanan nasional, serta dinamika global sebagai bagian dari pengambilan keputusan daerah.

Selain itu, fungsi DPRD sebagai representasi rakyat menuntut adanya keterhubungan yang kuat dengan konstituen. Dalam praktiknya, DPRD harus mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan publik yang konkret melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini memerlukan dukungan sistem yang



Upacara Pembukaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) di AKMIL Magelang Kamis, 16 April 2026

memadai, termasuk data, riset, dan kapasitas analitis.

Dengan demikian, penguatan kapasitas pimpinan DPRD tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kompetensi individu, tetapi juga mencakup penguatan sistem kelembagaan dan ekosistem politik yang sehat.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis Iceberg Theory dan Game Theory, penguatan kapasitas pimpinan DPRD perlu dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan sistemik. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah optimalisasi Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) oleh Lemhannas RI sebagai program nasional yang berkelanjutan.

Pertama, KPPD perlu difokuskan pada penguatan karakter kepemimpinan negarawan. Pimpinan DPRD harus memiliki integritas, wawasan kebangsaan, serta orientasi pada kepentingan nasional. Hal ini sejalan dengan tujuan KPPD untuk membentuk pemimpin legislatif yang berkarakter negarawan dan berintegritas.

Kedua, penguatan kapasitas teknokratis melalui peningkatan kemampuan analisis kebijakan, perencanaan anggaran, serta pengawasan berbasis kinerja. Pimpinan DPRD perlu dibekali dengan kemampuan memahami dokumen perencanaan seperti RPJMN dan RKPD, serta mampu mengintegrasikan Asta Cita ke dalam kebijakan daerah.

Ketiga, penguatan kapasitas kolaboratif melalui pelatihan komunikasi politik, negosiasi, dan manajemen konflik. Dalam perspektif Game Theory, kemampuan membangun kerja sama antaraktor menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan publik yang optimal.

Keempat, penguatan sistem pendukung DPRD, termasuk penyediaan tenaga ahli, akses terhadap data dan riset, serta pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis evidence.

Kelima, penguatan hubungan dengan masyarakat melalui mekanisme partisipasi publik yang lebih inklusif. DPRD harus mampu membangun sistem umpan balik yang efektif agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat.

Keenam, ke depan program KPPD tidak hanya ditujukan bagi pimpinan DPRD, tetapi juga perlu diperluas secara sistematis kepada seluruh anggota DPRD serta Sekretaris DPRD (Sekwan) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting karena efektivitas kelembagaan DPRD tidak hanya ditentukan oleh pimpinan, tetapi juga oleh kualitas kolektif anggota dewan serta kapasitas dukungan administratif dan teknokratik dari Sekretariat DPRD. Sekwan memiliki peran strategis dalam memastikan keberlanjutan proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan

melalui dukungan manajerial, data, serta koordinasi kelembagaan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM secara menyeluruh akan menciptakan ekosistem kelembagaan DPRD yang kuat, profesional, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.

Ketujuh, institutionalisasi KPPD sebagai program wajib nasional berbasis siklus karier (career cycle development), dengan pendekatan blended learning, coaching, dan evaluasi berbasis kinerja. Program ini harus terintegrasi dengan sistem pengembangan kepemimpinan nasional.

Akhirnya, penguatan kapasitas pimpinan dan seluruh ekosistem DPRD merupakan investasi strategis dalam memperkokoh ketahanan nasional. Dengan DPRD yang kolektif kuat, profesional, dan berorientasi pada kepentingan nasional, maka implementasi Asta Cita dapat berjalan efektif hingga ke tingkat daerah, sehingga Indonesia mampu menghadapi tantangan global dan mewujudkan cita-cita sebagai bangsa yang maju, mandiri, dan berdaulat.

Daftar Pustaka

- A Systems Thinking Model: The Iceberg*, https://bettereducate.com/uploads/file/43215_ASystemsThinkingModelTheIceberg_ASystemsThinkingModelTheIceberg.pdf
- Dadang Solihin (2012). *Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah*, <https://www.slideshare.net/slideshow/tugas-dan-fungsi-dprd-dalam-pembangunan-daerah/11750841>
- Dadang Solihin (2013). *Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif*, <https://www.slideshare.net/slideshow/optimalisasi-tugas-dan-fungsi-dprd-dalam-mewujudkan-pemerintahan-yang-efektif/16845000>
- Hans Peters (2015). *Game Theory: A Multi-Levelled Approach*, <https://www.slideshare.net/slideshow/comprehensive-guide-to-game-theory-strategic-thinking-and-applications-in-economics/286618409>
- Lemhannas RI (2026). *Rencana Garis Besar Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Pimpinan DPRD Seluruh Indonesia*

Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Sensus Ekonomi (SE) merupakan satu dari tiga sensus besar yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 tahun sekali, pada tahun yang berakhiran angka 6. Sensus Ekonomi akan menghasilkan data statistik dasar seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik

PELAKSANAAN: 15 JUNI – 31 AGUSTUS 2026

Tujuan

Pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat tentang kondisi usaha dan perekonomian masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Target Responden

Seluruh pelaku usaha di bidang ekonomi kecuali sektor pertanian di seluruh wilayah Indonesia

Hasil

- Informasi struktur ekonomi
- Informasi Karakteristik usaha
- Informasi Ekonomi digital
- Informasi Ekonomi Lingkungan



Ciri-ciri Petugas Sensus:

- ✓ Mengenakan atribut atau rompi sensus ekonomi 2026
- ✓ Membawa surat tugas dari BPS
- ✓ Memiliki kartu identitas atau tanda pengenal petugas resmi
- ✓ Bertugas melakukan pendataan dan wawancara terkait kegiatan usaha



Menjaga Ketahanan Ekonomi sebagai Pilar Utama Asta Cita di Tengah Dinamika Geopolitik Global

Prof Dr. Telisa Aulia Falianty, SE, ME, GRCE

Tenaga Profesional Lemhannas RI Bidang Ekonomi
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI



"In preparing for battle, I have always found that plans are useless, but planning is indispensable," demikian pernyataan Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower.

Dalam konteks ekonomi global hari ini, pernyataan tersebut menjadi sangat relevan. Dunia sedang bergerak dalam ketidakpastian yang sulit diprediksi. Konflik geopolitik, perang dagang, fragmentasi ekonomi, hingga volatilitas pasar keuangan internasional menunjukkan bahwa kekuatan sebuah negara tidak lagi hanya ditentukan oleh sumber daya alam atau tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi oleh kemampuan menjaga stabilitas dan membangun ketahanan menghadapi guncangan global. Di era globalisasi, perang tidak lagi hanya berlangsung melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui tekanan energi, suku bunga, rantai pasok, dan arus modal internasional. Karena itu, ketahanan ekonomi kini menjadi wajah baru dari kedaulatan nasional. Negara yang tidak memiliki fondasi ekonomi yang kuat akan mudah terguncang ketika dunia mengalami krisis. Dalam konteks itulah, penguatan rupiah dan stabilitas sektor keuangan menjadi agenda strategis untuk memastikan keberhasilan Asta Cita Presiden

Republik Indonesia. Asta Cita tidak hanya berbicara tentang percepatan pembangunan, tetapi juga tentang bagaimana membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan memiliki ketahanan ekonomi yang tangguh. Agenda hilirisasi industri, penguatan pangan dan energi, pembangunan sumber daya manusia, hingga pemerataan ekonomi membutuhkan stabilitas makroekonomi yang terjaga. Tanpa stabilitas ekonomi dan sektor keuangan yang kuat, berbagai program prioritas nasional akan sangat rentan terhadap tekanan eksternal. Ketika rupiah sempat menembus Rp17.613,5 per dolar AS, persoalannya bukan sekadar fluktuasi nilai tukar. Yang sesungguhnya sedang diuji ialah seberapa kuat ketahanan ekonomi Indonesia menghadapi tekanan global. Kajian penulis pada Mei 2026 menunjukkan bahwa depresiasi rupiah dalam enam bulan terakhir mencapai 4,52 persen dapat memberikan dampak langsung terhadap daya beli masyarakat serta sektor industri apabila tidak dimitigasi dengan baik. Setiap pelemahan rupiah sebesar satu persen

diperkirakan dapat menurunkan daya beli masyarakat sekitar 0,8–1,15 persen, menurunkan Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur sebesar 1,19 persen, serta menekan penjualan ritel sekitar 0,71 persen. Bahkan depresiasi setiap Rp100 terhadap dolar AS berpotensi meningkatkan defisit APBN hingga Rp0,8 triliun. Data tersebut menunjukkan bahwa stabilitas nilai tukar bukan sekadar isu moneter, melainkan menyangkut keberlangsungan ekonomi rakyat. Ketika rupiah melemah, harga bahan baku impor meningkat dan imported inflation mulai merambat ke berbagai sektor ekonomi. Industri tekstil, elektronik, makanan dan minuman, hingga kimia menghadapi kenaikan biaya produksi. Namun pada saat yang sama, dunia usaha sulit menaikkan harga jual karena daya beli masyarakat sedang melemah. Dari sinilah muncul fenomena shrinkflation, ketika ukuran atau kualitas produk dikurangi demi menjaga harga tetap terjangkau. Ketika nilai tukar terguncang, dampaknya menjarak ke inflasi, biaya produksi industri, daya beli masyarakat, hingga stabilitas sosial. Karena itu, menjaga stabilitas ekonomi pada dasarnya adalah menjaga stabilitas negara. Dalam perspektif ketahanan nasional, pelemahan rupiah sesungguhnya



merupakan cerminan daya tahan negara menghadapi tekanan eksternal. Pelemahan rupiah juga berhubungan dengan tergerusnya devisa yang dimiliki oleh negara. Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan yang terbaru adalah pembentukan Badan Ekspor Komoditas pada tanggal 20 Mei 2026 (persis di Hari Kebangkitan Nasional), yang disebut sebagai Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) menjadi langkah jawaban dari pemerintah saat ini untuk menghadapi tergerusnya devisa dan pelemahan rupiah. Banyaknya kebocoran uang negara dalam bentuk devisa karena praktik under invoicing dan penyelewengan di lapangan, serta laporan yang tidak sesuai telah merontokkan sendi sendi kekuatan kita dalam mengumpulkan devisa dalam dolar dan mengganggu ketahanan nasional. Dengan pendirian badan baru ini diharapkan dapat menjaga tata kelola ekspor semakin baik dan mendorong masuknya kembali dana dalam dolar untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan cadangan devisa.

Lebih lanjut kajian dari Samputra (2026) menegaskan bahwa krisis kepercayaan dan ketidakpastian global dapat memicu capital outflow serta tekanan terhadap nilai tukar. Ketergantungan pada pembiayaan asing menjadikan stabilitas ekonomi nasional mudah terguncang ketika terjadi flight to quality di pasar global. Dalam situasi seperti itu, sektor keuangan nasional berpotensi berada dalam kondisi fragile apabila stabilitas hanya dibangun melalui intervensi jangka pendek tanpa memperbaiki fundamental ekonomi dan tata kelola institusi. Dengan demikian jika DSI adalah sebagai jawaban dari upaya secara fundamental, struktural dan insititusional untuk memperkuat stabilitas makroekonomi kita. Namun hemat

penulis itu adalah syarat perlu. Syarat cukupnya perlu diiringi program Cinta Rupiah, program mencintai produk dalam negeri, mengembalikan kepercayaan pasar tentang kebijakan ekonomi kita agar lebih rasional dan memberikan ruang tumbuh bagi pelaku usaha serta meningkatkan kebijakan berbasiskan kepada teknokrasi dan kajian yang kuat agar setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki pondasi yang kuat dan juga mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, agar tercipta sense of belonging dari suatu kebijakan. Sebagaimana dikatakan ekonom pemenang Nobel Joseph Stiglitz, "Confidence is a fragile thing."

Kepercayaan pasar dapat tumbuh dalam waktu lama, tetapi dapat runtuh hanya dalam hitungan hari ketika kebijakan dianggap tidak konsisten atau institusi kehilangan kredibilitas. Karena itu, menjaga stabilitas rupiah tidak cukup dilakukan melalui kebijakan yang bersifat artifisial. Ketahanan ekonomi harus dibangun melalui penguatan struktur ekonomi nasional, mulai dari peningkatan cadangan devisa, percepatan hillirisasi industri, pengembangan manufaktur nasional, pengurangan ketergantungan impor energi, hingga perluasan penggunaan local currency settlement dalam perdagangan internasional. Namun ketahanan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh indikator makroekonomi. Ia juga ditentukan oleh kualitas tata kelola dan kredibilitas institusi negara. Pasar tidak hanya membaca angka-angka ekonomi, tetapi juga membaca arah kepemimpinan, kepastian hukum, efektivitas pengawasan sektor keuangan, dan konsistensi kebijakan publik. Negara dengan governance yang kuat akan lebih mampu bertahan menghadapi gejolak dibanding negara yang hanya mengandalkan intervensi jangka pendek.

Dalam perspektif antifragile yang dikemukakan Taleb (2012), sistem ekonomi tidak cukup hanya mampu bertahan dari guncangan, tetapi juga harus mampu menjadi lebih kuat setelah menghadapi krisis. Volatilitas pasar tidak selalu harus ditekani secara berlebihan, melainkan dijadikan sinyal untuk mendeteksi kelemahan institusional dan memperbaiki fondasi ekonomi secara lebih mendasar. Ketahanan ekonomi harus dibangun dari bawah melalui penguatan basis investor domestik, pendalaman pasar keuangan nasional, penjagaan integritas data, digitalisasi sektor keuangan, serta penguatan lembaga keuangan daerah agar ekonomi nasional tidak terlalu bergantung pada modal asing jangka pendek. Pada akhirnya, tantangan terbesar Indonesia bukan sekadar menjaga rupiah tetap stabil, tetapi memastikan bahwa setiap guncangan global justru menjadi momentum memperkuat fondasi ekonomi nasional. Dunia yang penuh ketidakpastian membutuhkan negara yang tidak hanya mampu bertahan dari krisis, tetapi juga tumbuh lebih kuat setelah melewatinya. Sebagaimana diingatkan Lee Kuan Yew, "The ultimate test of the value of a political system is whether it helps that society establish conditions which improve the standard of living for its people." Di situlah makna sesungguhnya dari ketahanan ekonomi sebagai pilar utama Asta Cita. Dengan modal ketahanan ekonomi yang kita perjuangkan maka kita optimis cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat terwujud dengan kolaborasi dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan.

Terimakasih telah menyimak tulisan ini. Jayalah Indonesia. (Pandangan penulis adalah opini pribadi dan tidak mewakili tempat penulis bekerja)

Peristiwa Pemantik Konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran akan terus berlanjut, serta implikasinya terhadap Indonesia



Oleh: Brigjen TNI Tomi Kaloko Utomo, M.Sc.

Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bidang Sistem Manajemen Nasional

“Perang tidak selalu dimulai dengan Rencana Besar”

Kalimat ini mengingatkan kita bahwa sejarah seringkali dibentuk oleh kejadian-kejadian tak terduga, bukan semata skenario matang di atas meja.

Banyak orang membayangkan perang sebagai sesuatu yang dihitung, dipersiapkan, lalu dijalankan bertahap. Negara seolah punya kendali penuh: kapan mulai, sejauh mana eskalasi, dan kapan berhenti. Namun kenyataan berkata lain. Perang Dunia I bukanlah rencana besar kekaisaran-kekaisaran Eropa. Ia berawal dari tembakan pistol Gavrilo Princip di Sarajevo, 28 Juni 1914, yang menewaskan Putra Mahkota Austria, Franz Ferdinand. Insiden lokal itu merambat cepat karena aliansi militer yang rumit. Austria-Hungaria menyerang Serbia,



Foto. [Kawant Haju/AFP]

Jerman masuk membantu sekutunya, Rusia membela Serbia, lalu Prancis dan Inggris ikut terseret. Satu peluru mengubah dunia. Dalam geopolitik, inilah yang disebut peristiwa pemantik konflik: kejadian yang membuat opsi menahan diri tak lagi cukup. Sebelum insiden, semua pihak masih berusaha menjaga ketegangan tetap terbatas. Namun ketika satu peristiwa dianggap melampaui batas, tekanan untuk merespons menjadi luar biasa. Langkah yang tadinya terlalu berisiko tiba-tiba terasa masuk akal, bahkan tak terhindarkan. Saat ini, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berada di atas keseimbangan yang sangat rapuh. Tak selalu tampak, tapi potensi satu peristiwa pemantik bisa mengubah arah secara drastis.

Empat Skenario Pemantik Konflik. Setidaknya ada empat skenario yang dapat memicu eskalasi berkelanjutan antara AS dan Iran.

Pertama, jatuhnya korban massal di pihak AS akibat serangan Iran. Dalam sistem demokrasi, korban jiwa bukan sekadar angka. Ia membangkitkan emosi publik luas, menekan pemerintah dari berbagai arah: masyarakat, media, hingga parlemen. Ruang gerak eksekutif menyempit. Keputusan tidak lagi semata pertimbangan strategis, tetapi juga dorongan opini publik untuk membalas dan menegaskan wibawa negara.

Kedua, keyakinan Iran bahwa teknologi militernya telah mendekati atau mencapai kemampuan nuklir operasional. Jika itu terjadi, cara pandang terhadap konflik berubah total. Bukan lagi respons sesaat, melainkan ancaman jangka panjang yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan secara permanen. Negara cenderung tak ingin menunggu terlalu lama karena khawatir kehilangan kesempatan bertindak. Keputusan pun diambil lebih cepat, dengan risiko lebih besar. Rasa aman berubah menjadi rasa terdesak.

Ketiga, pemblokiran Selat Hormuz yang berkepanjangan. Jalur energi

strategis ini jika terganggu dalam waktu lama, dampaknya bukan hanya di kawasan, tapi ke seluruh dunia. Harga energi melonjak, distribusi tersendat, ekonomi global tertekan. Konflik tak lagi urusan dua negara. Banyak pihak ikut terdampak, dan tekanan untuk bertindak membesar. Peristiwa pemantik dalam skenario ini bersifat sistemik: menarik banyak negara ke dalam pusaran yang sama.

Keempat, kualitas kepemimpinan, terutama dalam pengendalian emosi. Secara teoritis, negara bertindak rasional. Namun dalam praktik, keputusan strategis berada di tangan manusia dengan ego, tekanan politik, dan persepsi pribadi. Dalam hubungan antara Donald Trump dan kepemimpinan Iran di bawah Mojtaba Khamenei, dinamika ini jelas. Trump dikenal tegas, langsung, kerap menggunakan tekanan terbuka, dan tak segan menyampaikan ancaman keras. Ia cenderung mengambil keputusan cepat, termasuk opsi militer. Di sisi Iran, kepemimpinan Mojtaba Khamenei bercorak hardliner, dengan basis kekuatan pada militer dan Garda Revolusi, serta sikap konfrontatif terhadap Barat.

Kombinasi kedua karakter ini menciptakan interaksi yang mudah memanas. Dari AS: dorongan menunjukkan kekuatan agar tak terlihat lemah. Dari Iran: dorongan mempertahankan kedaulatan agar tak tunduk pada tekanan. Akibatnya, setiap insiden kecil berisiko dibesar-besarkan menjadi isu strategis. Pola aksi-reaksi yang saling menguatkan membuat konflik cenderung tak berhenti, melainkan terus berlanjut dan berpotensi meningkat.

Implikasi bagi Indonesia. Bagi Indonesia, dinamika konflik global perlu dilihat melalui kerangka Asta Cita Presiden Republik Indonesia sebagai arah strategis menjaga kepentingan nasional.

Pertama, penguatan ketahanan nasional. Konflik AS-Iran dapat berdampak pada stabilitas ekonomi,

energi, dan keamanan kawasan. Indonesia harus memiliki sistem nasional yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap krisis.

Kedua, peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia semakin penting. Prinsip bebas aktif memberi ruang bagi Indonesia untuk tidak terjebak dalam blok kekuatan, namun tetap aktif mendorong penyelesaian konflik melalui diplomasi dan dialog.

Ketiga, kemandirian ekonomi, termasuk energi. Potensi gangguan di Selat Hormuz menjadi pengingat bahwa ketergantungan pada faktor eksternal harus diminimalkan melalui diversifikasi dan penguatan sumber daya dalam negeri.

Keempat, kualitas kepemimpinan nasional menjadi faktor penentu. Dalam situasi global yang penuh tekanan, kepemimpinan yang rasional, tenang, dan berorientasi pada kepentingan rakyat sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas nasional. Pemimpin harus memahami konflik global bukan hanya penting secara akademis, tetapi juga menjadi bagian dari implementasi nyata Asta Cita dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan Indonesia.

Penutup

Ada satu pelajaran penting: perang besar jarang benar-benar dimulai dari sebuah rencana besar. Lebih sering, ia berawal dari satu peristiwa pemantik yang kemudian membesar akibat rangkaian respons yang tak terkendali. Dalam dinamika AS dan Iran, hal ini semakin relevan. Ketegangan tidak selalu lahir dari niat berperang, melainkan dari interaksi keputusan yang saling merespons dalam situasi penuh tekanan. Pada akhirnya, yang menentukan bukan hanya kekuatan militer, tetapi juga kematangan para pemimpin dalam mengambil keputusan. Karena perang bukan

semata soal senjata, melainkan tentang bagaimana manusia mengelola emosi, menahan diri, dan tetap rasional di tengah tekanan yang paling berat.



LAKSAMANA MADYA TNI

ERWIN S. ALDEDHARMA

Wakil Gubernur Lemhannas RI

"Lemhannas harus menjadi tempat lahirnya para pemimpin nasional yang memiliki wawasan kebangsaan, memahami sejarah bangsa, dan mampu membaca dinamika geopolitik"

Surabaya menjadi awal dari perjalanan hidup Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma, S.E., M.M., M.Sc. Putra kelahiran 5 Mei 1970 itu lahir ketika ayahnya tengah berdinis sebagai perwira TNI Angkatan Laut di Kota Pahlawan, sementara sang ibu merupakan putri asli Surabaya.

"Saya lahir di Surabaya karena ayah sedang berdinis di sana. Di kota itu pula ayah bertemu dengan ibu saya," kenangannya.

Sebagai anak sulung dari tiga bersaudara, Erwin dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang menempatkan disiplin sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Posisi sebagai anak pertama membuatnya terbiasa memikul tanggung jawab lebih awal. Orang tua berharap dirinya dapat menjadi teladan bagi kedua adiknya, sebuah nilai yang kemudian melekat hingga dewasa.

Kehidupan keluarganya mengikuti ritme penugasan militer. Hingga usia lima tahun, Surabaya menjadi rumah bagi keluarga kecil tersebut. Setelah itu, mereka berpindah ke Kuala Lumpur, Malaysia, ketika sang ayah mendapat penugasan sebagai Atase Laut Republik Indonesia.

Perpindahan itu menjadi pengalaman pertamanya tinggal di luar negeri. Pendidikan taman kanak-kanak hingga sebagian sekolah dasar dijalannya di Kuala Lumpur. Lingkungan baru tidak menjadi hambatan karena bahasa Melayu terasa dekat dengan bahasa yang digunakan sehari-hari.

"Bahasanya masih bahasa Melayu, jadi saya tidak merasa harus belajar bahasa yang benar-benar baru," tuturnya.

Ketika masa penugasan sang ayah di Malaysia berakhir, Erwin sekeluarga kembali ke Surabaya.

Erwin menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di kota kelahirannya sebelum melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama. Pada 1982, ayahnya mendapat amanah sebagai anggota DPR Fraksi ABRI sehingga keluarga berpindah ke Jakarta.

Selepas menyelesaikan pendidikan menengah atas di Jakarta, Erwin memilih mengikuti seleksi Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). "Setelah lulus SMA saya mendaftar ke AKABRI dan langsung diterima. Saya ditempatkan di Angkatan Laut, sehingga kembali lagi ke Surabaya," tuturnya.

Bagi alumnus Akademi Angkatan Laut Angkatan XXXVII itu, kehidupan sebagai taruna merupakan fase pembentukan yang sesungguhnya. Disiplin, ketahanan fisik, kemampuan berpikir taktis, hingga tanggung jawab sebagai calon pemimpin ditempa melalui pendidikan yang berlangsung dalam ritme kehidupan militer.

"Kalau ditanya apa yang membentuk karakter saya, jawabannya adalah gemblengan selama pendidikan Taruna, kemudian diperkuat oleh pengalaman penugasan," katanya.

Semangat untuk terus belajar juga menjadi bagian dari perjalanan pengabdianya. Setelah dilantik sebagai perwira TNI Angkatan Laut pada 27 Juli 1991, Erwin tidak berhenti menempuh pendidikan. Berbagai kursus dan pendidikan pengembangan di dalam negeri diikuti seiring bertambahnya tanggung jawab, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan profesional di Australia dan Amerika Serikat, termasuk Naval Staff College, National War College, dan program National Security Strategy. Pendidikan formal pun terus ditempuh hingga meraih gelar Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, serta Magister National Security Strategy.

Baginya, pendidikan dan penugasan merupakan dua ruang belajar yang saling melengkapi. Ruang kelas memperluas wawasan, sedangkan penugasan mengajarkan bagaimana pengetahuan diterapkan dalam situasi nyata.

Karier militer Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma dimulai dari tempat yang selama ini hanya dikenalnya melalui pendidikan, yaitu geladak kapal perang. Penugasan pertama sebagai Asisten Perwira Divisi Pusat Informasi Tempur KRI KST-356 pada 1992 membuka babak baru dalam pengabdianya. Sejak saat itu, laut menjadi ruang kerja sekaligus ruang belajar yang memperkenalkannya pada ritme kehidupan seorang prajurit TNI Angkatan Laut.

Berbeda dengan penugasan di darat, kehidupan di kapal menuntut kesiapan setiap saat. Dalam ruang yang terbatas, seluruh awak dituntut bekerja sebagai satu kesatuan. Ketika kapal berlayar, tidak ada ruang untuk menunda keputusan ataupun mengabaikan tanggung jawab. Setiap orang memegang peran yang saling berkaitan.

"Sebagian besar penugasan saya berada di atas kapal. Kami bisa berlayar berbulan-bulan, jauh dari keluarga dan tidak kembali ke pangkalan selama tiga sampai empat bulan," kenangannya.

Ritme kehidupan itu mengajarkan banyak hal yang tidak selalu ditemukan di ruang kelas. Disiplin menjadi kebiasaan, kerja sama menjadi kebutuhan, sementara kemampuan mengambil keputusan diasah melalui situasi yang terus berubah. Laut mengajarkan bahwa keberhasilan sebuah pelayaran tidak ditentukan oleh satu orang, melainkan oleh kemampuan seluruh awak menjaga kepercayaan dan menjalankan tugas masing-masing.



Pelantikan Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma sebagai Wakil Gubernur Lemhannas RI di Ruang Hening Gedung Trigatra Lemhannas RI.

Penugasan demi penugasan kemudian mempertemukan Erwin dengan tanggung jawab yang semakin besar. Dari Kepala Divisi, Kepala Departemen Operasi, Palaksa, hingga dipercaya menjadi Komandan KRI Sutedi Senoputra, KRI Nala, dan KRI Hasan Basri, setiap jabatan menghadirkan tantangan yang berbeda. Kepercayaan tersebut tidak hanya menguji kemampuan teknis sebagai pelaut, tetapi juga kematangan dalam memimpin manusia.

Kehidupan di laut juga meninggalkan jejak dalam kesehariannya. Kegiatan luar ruang, perjalanan ke berbagai daerah, dan ketertarikan menjelajahi tempat-tempat baru menjadi bagian dari dirinya. Bahkan, kehidupan di kapal yang memberi ruang bagi setiap awak untuk menikmati waktunya sendiri membuatnya terbiasa menghargai kesunyian sebagai ruang untuk berpikir.

Dari geladak kapal pula tumbuh keinginan untuk terus memperluas cakrawala. Setiap pelabuhan menghadirkan pengalaman baru, dan setiap penugasan membuka kesempatan untuk memahami dunia yang lebih luas.

Keinginan melihat dunia sebenarnya telah tumbuh sejak masa kecil, ketika Erwin mengikuti penugasan ayahnya di Kuala Lumpur. Pengalaman tinggal di luar negeri meninggalkan kesan yang terus melekat hingga dewasa.

"Saya pernah tinggal di Kuala Lumpur ketika masih kecil. Sejak kembali ke Indonesia, saya berharap suatu hari bisa

kembali ke luar negeri melalui penugasan negara," tuturnya.

Harapan itu kemudian terwujud melalui berbagai penugasan internasional. Kesempatan mengikuti pendidikan, seminar, latihan bersama, hingga forum bilateral dan multilateral membawanya bertemu dengan beragam perspektif mengenai keamanan maritim, strategi pertahanan, dan kepemimpinan militer.

"Saya selalu berusaha mencari kesempatan mengikuti pendidikan, seminar, maupun forum internasional. Dari situ saya bisa melihat tempat baru, bertemu orang-orang baru, dan berdiskusi mengenai banyak hal yang sebelumnya belum pernah saya temui," ungkapnya.

Pengalaman tersebut memperluas cara pandanginya terhadap kepemimpinan. Setiap negara memiliki tantangan yang berbeda, tetapi hampir semuanya menghadapi persoalan yang sama, yaitu bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perubahan.

Pandangan itulah yang kemudian dibawanya ketika memimpin berbagai organisasi di lingkungan TNI Angkatan Laut. Kepemimpinan, menurutnya, tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengelola operasi, tetapi juga kemampuan memahami manusia yang berada di dalam organisasi tersebut.

Berbagai penugasan yang dijalani selama lebih dari tiga dekade

mempertemukan Erwin dengan beragam karakter, latar belakang, dan pengalaman anggota yang dipimpinnya. Dari situ lahir satu keyakinan yang terus dipegang hingga kini.

"Prinsip utama saya sederhana, yaitu memperhatikan anak buah. Tanpa anak buah, seseorang tidak akan pernah menjadi pemimpin," tuturnya.

Bagi Erwin, perhatian kepada bawahan bukan sekadar memastikan pekerjaan selesai tepat waktu. Kepemimpinan menuntut kemampuan memahami setiap individu, mengenali kekuatan maupun keterbatasannya, lalu menempatkan mereka pada peran yang tepat.

Dalam organisasi, setiap orang datang dengan usia, pengalaman, dan latar belakang yang berbeda. Karena itu, pendekatan seorang pemimpin tidak dapat diseragamkan.

"Ada saatnya kita menjadi orang tua bagi anggota yang lebih muda. Di kesempatan lain kita menjadi teman berdiskusi. Bahkan kepada anggota yang lebih senior, kita juga harus mampu menempatkan diri seperti seorang adik," jelasnya.

Prinsip itu terus dibawa ketika ruang pengabdianya semakin luas. Memimpin organisasi berskala besar pada hakikatnya tidak berbeda dengan memimpin sebuah kapal. Tujuan hanya dapat dicapai apabila setiap orang memahami perannya dan merasa dihargai sebagai bagian dari organisasi.

Pengalaman memimpin di laut menjadi pijakan ketika ruang pengabdian Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma terus berkembang. Tanggung jawab yang semula berpusat pada satu kapal dan satu satuan perlahan bergeser menuju lingkup organisasi yang lebih luas. Setiap penugasan menghadirkan tantangan yang berbeda, sekaligus memperluas perspektifnya mengenai kepemimpinan dan pertahanan negara.

Kepercayaan itu diberikan secara bertahap. Perwira tinggi TNI Angkatan Laut tersebut pernah memimpin Pangkalan TNI AL Palembang, Satuan Amfibi Komando Armada RI Kawasan Timur, hingga Gugus Tempur Laut

Komando Armada RI Kawasan Barat. Pengalaman operasional kemudian berpadu dengan tanggung jawab pada level pembinaan organisasi ketika dirinya dipercaya menduduki berbagai jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Laut.

Ruang pengabdian itu terus meluas. Amanah sebagai Panglima Komando Lintas Laut Militer, Wakil Komandan Jenderal Akademi TNI, Panglima Koarmada I, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, hingga Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut menjadi bagian dari perjalanan yang mempertemukannya dengan berbagai persoalan strategis di bidang pertahanan. Setiap jabatan menghadirkan kompleksitas yang berbeda, mulai dari pembinaan personel, kesiapan operasional, kerja sama antarinstansi, hingga penyusunan kebijakan pada tingkat nasional.

Rangkaian pengabdian tersebut mengantarkannya menerima berbagai penghargaan, di antaranya Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Jalasena Pratama, Bintang Jalasena Nararya, Satyalancana Wira Dharma, Satyalancana Kesetiaan, serta sejumlah tanda kehormatan lainnya. Penghargaan-penghargaan tersebut menjadi penanda perjalanan panjang pengabdian kepada bangsa dan negara.

Meski ruang tanggung jawab terus berubah, cara pandangya terhadap kepemimpinan tetap berpijak pada

prinsip yang sama. Bagi Erwin, organisasi sebesar apa pun pada akhirnya tetap bergantung pada kualitas manusia yang menggerakkannya.

Pemikiran itulah yang kini dibawanya ke lingkungan Lemhannas RI, ketika fokus pengabdian bergeser dari memimpin organisasi pertahanan menjadi ikut menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia.

Memasuki Lemhannas RI membuka babak baru dalam pengabdian Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma. Jika sebelumnya sebagian besar tanggung jawabnya berkaitan dengan pembangunan kekuatan pertahanan, kini perhatiannya tertuju pada pembangunan kualitas kepemimpinan nasional.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi Indonesia pada masa depan berkembang jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Perubahan geopolitik, kemajuan teknologi, disrupsi ekonomi, hingga munculnya berbagai bentuk ancaman nonmiliter menuntut hadirnya pemimpin yang mampu berpikir strategis sekaligus adaptif.

"Lemhannas perlu terus berbenah. Metode pembelajaran, materi pendidikan, maupun cara penyampaiannya harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan karakter generasi yang terus berubah," ujarnya.

Bagi penerima Bintang Yudha Dharma Pratama tersebut, proses pendidikan kepemimpinan tidak dapat berhenti pada

pendekatan konvensional. Generasi milenial, Generasi Z, hingga Generasi Alfa memiliki karakter, pola belajar, dan cara memandang dunia yang berbeda. Perubahan tersebut menuntut pembaruan metode pendidikan agar tetap relevan dengan kebutuhan masa depan.

Di sisi lain, Lemhannas RI juga perlu memperkuat kolaborasi dengan kementerian, lembaga, perguruan tinggi, dunia usaha, dan berbagai institusi strategis lainnya. Sinergi tersebut diperlukan agar proses pendidikan kepemimpinan selalu terhubung dengan dinamika kebijakan nasional serta tantangan nyata yang dihadapi bangsa.

"Lemhannas harus menjadi tempat lahirnya para pemimpin nasional yang memiliki wawasan kebangsaan, memahami sejarah bangsa, dan mampu membaca dinamika geopolitik," tuturnya.

Bagi Erwin, kualitas kepemimpinan akan menentukan kualitas masa depan Indonesia. Karena itu, membangun pemimpin bukan hanya menjadi tugas sebuah lembaga, melainkan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan bangsa.

Perjalanan hidup Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma memperlihatkan bagaimana pengalaman-pengalaman yang tampak sederhana dapat menjadi fondasi bagi sebuah kepemimpinan. Masa kecil yang berpindah mengikuti penugasan ayah memperkenalkannya pada kemampuan beradaptasi. Pendidikan di Akademi Angkatan Laut menanamkan disiplin dan tanggung jawab. Kehidupan di kapal perang mengajarkan arti kebersamaan, ketahanan, dan pengambilan keputusan. Sementara berbagai penugasan di dalam maupun luar negeri memperluas cara pandangya terhadap kepemimpinan dan kepentingan nasional.

Seluruh pengalaman itu bertemu dalam satu keyakinan yang terus dipegang hingga kini: kualitas sebuah organisasi selalu bermula dari kualitas manusia yang berada di dalamnya. Karena itulah perhatian terhadap pembinaan sumber daya manusia, pendidikan kepemimpinan, dan penguatan wawasan kebangsaan menjadi benang merah dalam perjalanan pengabdianya.



Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma saat menerima Gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara.

Sri Yulianti, S.E., M.M.

Integritas dan Spiritualitas: Pedoman Sri Yulianti dalam Mengelola Keuangan Negara

Di balik kelancaran dan ketepatan pelaporan keuangan Lemhannas RI, terdapat dedikasi para pegawainya Bagian Keuangan, Biro Umum Lemhannas RI. Salah satunya adalah Sri Yulianti, S.E., M.M., seorang Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda yang juga dipercaya sebagai Subkoordinator Akuntansi dan Laporan Keuangan di Biro Umum. Mengabdikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lemhannas RI selama 11 tahun, ASN kelahiran Tasikmalaya yang lebih dikenal dengan panggilan "Sri" merupakan anak bungsu dari empat bersaudara. Sebuah fakta unik yang mungkin jarang diketahui oleh rekan kerjanya, Sri merupakan salah satu dari kembar tiga identik. Pengalaman tumbuh sebagai saudara kembar tiga menjadi cerita unik yang membekas hingga masa sekolah.

"Karena namanya kembar kan kadang orang salah manggil, salah orang," ujarnya sembari tertawa.

Menghabiskan masa kecil hingga remaja di Tasikmalaya, Sri menuturkan bahwa dia dan dua saudara kembarnya memiliki minat yang berbeda. Hal ini terlihat saat mereka bertiga memilih tiga peminatan berbeda saat duduk di bangku Sekolah menengah atas.

"Nah, pas kebetulan yang kelas tiga (SMA) ini kita beda... beda peminatan. Yang satu jurusan IPA, yang satu bahasa, yang satu IPS," tutur Sri yang saat itu memilih peminatan IPA.

Saat duduk di bangku Sekolah menengah itu, Sri juga sudah memiliki tekad kuat untuk mandiri. Berbekal restu dari kedua orang tuanya, Sri memutuskan untuk merantau ke Jakarta guna selepas menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atasnya. Di Jakarta, dirinya menempuh jenjang S1 pada program studi Akuntansi di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Sri bercerita bahwa pada semester akhir jenjang S1, salah seorang dosennya merekomendasikan dirinya untuk bekerja di sebuah kantor konsultan pajak di kawasan Serpong. Di tempat itulah ketelitiannya di bidang keuangan mulai ditempa secara profesional selama kurang lebih tiga tahun. Rutinitas pekerjaannya berfokus pada pengolahan data, analisis, penyusunan laporan hingga proses audit. Setelah tiga tahun berkarier, Sri memutuskan untuk menikah dan kemudian pindah mengikuti suaminya. Perpindahan tersebut membawanya ke lingkungan kerja baru, yakni sebuah kantor konsultan pajak di Jakarta Timur.



Di tengah kesibukannya bekerja, Sri juga sempat dua kali mengikuti seleksi di Kementerian Keuangan namun belum berhasil diterima. Ia bersama sang suami mulai memikirkan strategi lain untuk mencari peluang untuk menjadi ASN. Sang suami menyarankan agar Sri mencoba kementerian atau lembaga pemerintah lainnya.

Berangkat dari saran tersebut, Sri akhirnya memutuskan mengikuti seleksi CPNS di Lemhannas RI. Lucunya, keputusan itu pun tidak lepas dari usulan sang suami yang sudah cukup familiar dengan Lemhannas karena kegemarannya menonton pagelaran wayang yang saat itu sering diadakan oleh Lemhannas RI. Meski awalnya hanya didasari strategi untuk mencari peluang yang lebih besar, Sri akhirnya diterima dan merasa bahwa jalannya memang bermuara di Lemhannas RI. "Ya udah (daftar) di Lemhannas, terus emang rezekinya di Lemhannas," tuturnya.

Sri menuturkan bahwa keinginannya menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak lepas dari latar belakang keluarganya yang banyak berprofesi sebagai PNS. "Karena background keluarga besar banyak yang PNS sehingga kayak kita tuh terdokrtrin. Harapan orang tua pun anaknya PNS," ujarnya.

Di balik keputusannya tersebut, Sri juga menyimpan keinginan untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Saat itu, ia merasa belum mampu membalas jasa orang tua secara materi. Karena itu, ia berpikir bahwa mewujudkan harapan orang tua agar anaknya menjadi PNS dapat menjadi salah satu bentuk bakti kepada mereka.

"Oh mungkin dengan saya bisa mewujudkan mimpi mereka anaknya bisa jadi PNS, mungkin dengan saya daftar PNS, keterima, bisa sedikit membalas budi ke mereka (orang tuanya)," tuturnya.

Sri Yulianti menuturkan bahwa perpindahannya dari sektor swasta ke instansi pemerintah menjadi pengalaman yang penuh tantangan sekaligus pembelajaran baru. Ketika bergabung di Lemhannas RI, Sri harus mempelajari banyak hal yang sebelumnya tidak pernah ia kerjakan.

"Ketika di Lemhannas ini saya pun harus belajar yang sangat teknik-teknik banget," ujarnya.

Ia mencontohkan, di tempat kerja sebelumnya urusan administrasi seperti membuat undangan atau surat-menyurat ditangani oleh bagian tata usaha khusus. Sementara di Lemhannas RI, ia harus memahami dan mengerjakan sendiri proses administrasi tersebut hingga mendistribusikannya kepada pihak terkait.

Selain itu, Sri juga mulai memahami mekanisme penyusunan anggaran di instansi pemerintah yang memiliki berbagai aturan dan batasan. Menurutnya, ritme kerja di Biro Perencanaan (dulu) tempatnya bertugas saat itu tergolong cepat dengan beban kerja yang cukup tinggi. Meski demikian, pengalaman tersebut justru menjadi bekal penting dalam perjalanan kariernya. Sri merasa pengalaman berada di level pelaksana membuatnya lebih memahami berbagai pertimbangan ketika kini berada pada posisi yang dapat mengambil keputusan. "Jadi ketika sekarang bisa ngambil keputusan ya, pengalaman dulu itu jadi landasannya kita sekarang," tuturnya. Pengalaman tersebut, lanjut Sri, membentuk cara pandanginya agar setiap keputusan yang diambil tidak berbenturan dengan kepentingan maupun aturan yang ada.

Bekerja mengelola keuangan negara tentu bukan tanpa godaan dan tekanan. Menghadapi dinamika tersebut, Sri memiliki pedoman nilai yang selalu ia pegang teguh, yakni integritas dan spiritualitas. Ia senantiasa berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan secara profesional, taat pada aturan yang berlaku, dan memastikannya selesai tepat waktu. Di samping itu, dirinya meyakini bahwa dengan melibatkan Tuhan dalam setiap aspek pekerjaan, seseorang akan secara otomatis dijauhkan dari hal-hal maupun niat yang tidak baik.

"Yang pertama mungkin integritas ya. Integritas di mana saya harus menyelesaikan pekerjaan itu secara profesional, taat aturan, dan tepat waktu. Kemudian juga yang keduanya mungkin nilainya ya itu spiritualnya ya, saya percaya bahwa kalau kita melibatkan Allah dalam segala hal, insyaallah akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, bahkan mungkin dari niat-niat yang tidak baik," tutur Sri.

Bagi Sri, menjadi ASN adalah sebuah janji pengabdian kepada Tuhan, diri sendiri, bangsa, dan masyarakat luas. Ada rasa bangga yang mendalam ketika ia menyadari bahwa apa yang ia kerjakan

secara konsisten turut andil dalam membangun bangsa, walau melalui peran sekecil apa pun.

"Ada rasa bangga sekaligus tanggung jawab kita karena turut membangun bangsa walaupun melalui peran kita sekecil apapun ya, di khususnya saya di keuangan," jelas Sri.

Semangat Sri untuk konsisten turut andil dalam membangun bangsa membawanya kembali ke bangku pendidikan. Demi memperluas wawasan dan mendukung pengembangan karirnya di Lemhannas RI, ia mengambil program S2 Magister Manajemen Keuangan di Universitas Nasional dan berhasil lulus pada tahun 2022.

Menjalani peran ganda sebagai ASN, mahasiswa, sekaligus ibu dari dua anak tentu bukan hal yang mudah. Rutinitas perkuliahan di akhir pekan memaksanya untuk mengorbankan sebagian waktu berkumpul bersama keluarga. Namun, berkat pengertian dan dukungan penuh dari suami serta anak-anaknya, ia sukses meraih gelar master yang tidak hanya menyegarkan kembali keilmuan akademisnya, tetapi juga membuatnya lebih melek dan adaptif terhadap perubahan aturan pengelolaan anggaran yang sangat dinamis.

"Alhamdulillahnya aku bersyukur punya support system suami dan anak-anak," ujar Sri.

Di akhir wawancara, Sri memiliki komitmen kuat untuk terus memutakhirkan kemampuannya demi menunjang tugas pokok Lemhannas RI. Ia bertekad untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan di Lemhannas RI selalu akuntabel, profesional, berintegritas, dan memastikan setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan bisa benar-benar tepat sasaran. Lebih dari itu, ia menaruh harapan besar agar Lemhannas RI mampu terus mencetak pimpinan-pimpinan tingkat nasional yang beradab, berilmu, dan beretika, serta semakin diakui di kancah dunia. Kontribusi tulus yang Sri berikan menjadi bukti nyata bahwa menjadi abdi negara adalah sebuah panggilan jiwa untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi kelancaran roda institusi dan kemajuan nusa bangsa.



Foto. BPMI Setpres/Cahyo

Bertemu di Jakarta, RI-Jerman Sepakati Penguatan Investasi Tenaga Kerja Terampil

Kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, ke Jakarta pada Senin, 15 Juni 2026, menjadi sorotan utama dalam agenda diplomasi internasional Indonesia. Kedatangan Steinmeier yang disambut langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Merdeka ini bukan sekadar kunjungan seremonial biasa. Momen ini menandai fase krusial dari kemitraan strategis kedua negara di tengah dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu. Kunjungan keempat Steinmeier ke Tanah Air ini sekaligus menjadi langkah awal menyongsong peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman yang akan jatuh pada tahun 2027 mendatang.

Pertemuan empat mata atau tête-à-tête yang berlangsung selama dua jam penuh antara Presiden Prabowo dan Presiden Steinmeier menghasilkan sejumlah kesepakatan bernilai strategis tinggi. Diskusi kedua pemimpin negara secara tegas melampaui isu perdagangan konvensional, merambah secara mendalam pada penguatan kerja sama di sektor investasi, transisi energi, hilirisasi industri, kendaraan listrik, hingga semikonduktor. Salah satu desakan utama dari pertemuan ini adalah percepatan penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-

CEPA). Presiden Prabowo sangat berharap Jerman dapat memainkan peran aktif dalam meratifikasi perjanjian tersebut, yang diyakini akan membuka keran akses pasar yang jauh lebih masif bagi Indonesia di Eropa, sekaligus memberikan peluang bagi perusahaan menengah Jerman untuk berekspansi di kawasan Asia Tenggara.

Tidak hanya terfokus pada urusan modal dan komoditas, sektor pengembangan sumber daya manusia nyatanya menjadi primadona dalam kesepakatan diplomasi kali ini. Hal ini dibuktikan melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) mengenai Global Skills Partnership di sektor keperawatan. Kerja sama ini merupakan sebuah langkah konkret yang menjanjikan, di mana Indonesia tidak sekadar mengirimkan tenaga kerja, melainkan turut memfasilitasi transfer keterampilan berstandar global dan menguatkan ekosistem pendidikan vokasi. Presiden Prabowo bahkan secara khusus menargetkan perluasan peluang kerja bagi talenta-talenta unggul Indonesia di sektor industri teknologi tingkat tinggi di Jerman, sebuah manuver taktis untuk merespons kebutuhan industri modern di kedua belah pihak.

Pergeseran lanskap ekonomi global terbukti membuat Jerman dan Indonesia semakin saling membutuhkan. Jika pada Deklarasi Jakarta tahun 2012 fokus kerja

sama masih berkuat pada pemulihan pasca-krisis, kini arah kompas bergeser pada ketahanan rantai pasok mineral kritis, tanah jarang, dan energi bersih. Indonesia, dengan cadangan sumber daya strategisnya yang melimpah, mengundang Jerman secara terbuka untuk merajut kerja sama di sektor infrastruktur dan hilirisasi. Di sisi lain, keunggulan absolut Jerman dalam penguasaan teknologi inovatif ramah lingkungan menjadikannya mitra transisi energi yang paling ideal bagi visi ekonomi berkelanjutan yang sedang dibangun oleh Indonesia.

Jamuan santap siang kenegaraan di Istana Negara kemudian menjadi penutup manis yang merefleksikan kehormatan historis kedua bangsa. Presiden Prabowo, yang memiliki kenangan personal saat menjalani pelatihan militer di Jerman pada tahun 1981, menekankan betapa Jerman secara konsisten telah menjadi sumber inspirasi bagi kedisiplinan, kemajuan teknologi, dan pendidikan di Indonesia. Pada akhirnya, keberhasilan kemitraan raksasa ini ke depannya tentu tidak lagi diukur dari seberapa banyak lembar nota kesepahaman yang ditandatangani di atas meja, melainkan pada eksekusi nyata yang mampu membawa peningkatan investasi, perluasan lapangan kerja, serta ketangguhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat Indonesia dan Jerman.

Sumber: BPMI Setpres

● HOT NEWS

Tim para-atletik Indonesia kembali menorehkan tinta emas di panggung olahraga internasional dengan mengukuhkan diri

sebagai juara umum pada ajang bergengsi World Para Athletics Grand Prix 2026.

Dalam kompetisi tingkat dunia yang diselenggarakan di Tunisia pada 12 hingga 20 Juni 2026 tersebut, kontingen Merah Putih tampil luar biasa dan berhasil mendominasi lintasan. Melalui semangat juang yang tidak kenal lelah, Indonesia sukses mengumpulkan total 29 medali yang terdiri dari 15 medali emas, 7 medali perak, dan 7 medali perunggu. Prestasi gemilang ini membuat Indonesia berhak menduduki puncak klasemen akhir, berbagi takhta kehormatan bersama negara tangguh Ukraina yang juga mencatatkan perolehan medali yang sepenuhnya identik.

Keberhasilan ini sekaligus mengungguli perolehan medali tuan rumah Tunisia yang harus puas berada di peringkat ketiga dengan raihan 10 medali emas, 6 medali perak, dan 9 medali perunggu. Di bawah mereka, persaingan juga berlangsung sangat ketat dengan kehadiran Uzbekistan di posisi keempat dan Rusia di peringkat kelima. Capaian luar biasa dari kontingen Indonesia ini menjadi bukti nyata bahwa sistem pembinaan atlet disabilitas nasional berjalan dengan sangat konsisten dan berkesinambungan. Tidak hanya menunjukkan dominasi di tingkat regional

seperti pada ajang ASEAN Para Games, para pahlawan olahraga ini kembali membuktikan kapasitas mental dan teknis mereka saat berhadapan langsung dengan kekuatan-kekuatan utama olahraga dari seluruh penjuru dunia.

Kesuksesan kontingen Merah Putih ini tentunya tidak lepas dari performa impresif yang ditunjukkan oleh sejumlah atlet andalan. Saptoyogo Purnomo kembali menjadi bintang lintasan dengan memborong tiga medali emas dari nomor lari 100 meter dan 200 meter putra, serta nomor beregu estafet universal 4x100 meter. Penampilan sensasional turut dihadirkan oleh Nanda Mei Sholihah yang juga sukses menyapu bersih tiga medali emas pada nomor 100 meter dan 200 meter putri, serta estafet universal. Selain itu, Karisma Evi Tiarani mempertegas statusnya sebagai atlet elit dunia dengan menyumbangkan dua medali emas dari nomor lari 100 meter putri dan nomor lompat jauh, yang semakin menyempurnakan dominasi skuad Indonesia.

Raihan keping medali emas juga disumbangkan oleh deretan atlet berbakat lainnya seperti Alfin Nomleni yang sukses menjadi yang tercepat di nomor 400 meter putra, serta Ansyari yang berjaya di nomor lempar lembing putra. Meskipun telah berhasil berdiri di podium tertinggi, para

pahlawan olahraga kebanggaan bangsa ini tidak lantas merasa berpuas diri dengan catatan waktu dan jarak yang mereka raih. Mereka tetap memiliki keinginan kuat untuk terus mengevaluasi performa pribadi demi memperbaiki rekor di ajang yang lebih tinggi. Atmosfer kompetitif yang terbangun di Tunisia ini nyatanya sukses menjadi suntikan energi yang memacu semangat juang mereka untuk terus mendobrak keterbatasan dan menampilkan kualitas terbaik.

Lebih dari sekadar memperebutkan gelar juara umum, pencapaian luar biasa di ajang kompetisi World Para Athletics Grand Prix 2026 ini memiliki makna yang sangat strategis bagi masa depan tim nasional. Koordinator Tim Pelatih Para Atletik Indonesia menyatakan bahwa setiap poin yang diraih dalam kejuaraan resmi kalender dunia ini merupakan modal yang teramat berharga. Akumulasi poin tersebut akan menjadi penentu utama dalam mengamankan tiket kualifikasi menuju ajang multievent bergengsi Asian Para Games 2026 yang akan dilangsungkan di Nagoya, Jepang. Dengan tingginya intensitas persaingan dari negara-negara Asia demi mendulang poin maksimal, kemenangan ini memberikan suntikan motivasi yang sangat masif bagi atlet Indonesia untuk menatap babak kualifikasi selanjutnya dengan keyakinan tingkat tinggi.

Sumber: Berbagai Sumber

Mental Juara, Merah Putih Berjaya di Grand Prix Tunisia



Foto: npcindonesia.or.id

Camptostemon philippinensis. Permata Langka Hutan Mangrove

Foto: Mongabay.id

Indonesia memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia dan menjadi rumah bagi beragam spesies yang berperan penting untuk kehidupan pesisir. Di antara keragaman tersebut terdapat satu jenis yang sangat langka dan dilindungi, yaitu *Camptostemon philippinensis*, yang dikenal dengan nama lokal baluno filipina. Spesies ini menarik perhatian para peneliti karena populasinya yang terbatas dan persebarannya yang relatif sempit.

Camptostemon philippinensis merupakan pohon mangrove berukuran sedang yang dapat tumbuh hingga belasan meter. Batangnya tegak dengan kulit kayu berwarna cokelat keabu-abuan. Daunnya berbentuk lonjong hingga bulat telur, bertekstur agak tebal, dan mengilap sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan pesisir yang asin. Bunganya berwarna putih hingga kekuningan dengan benang sari yang mencolok, sedangkan buahnya berbentuk bulat dan dapat tersebar melalui arus laut.

Spesies ini dideskripsikan secara ilmiah pada akhir abad ke-19 oleh ahli botani Italia, Odoardo Beccari. Meski namanya merujuk pada Filipina, keberadaannya juga ditemukan di Indonesia, terutama di beberapa wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Salah satu populasi penting *C. philippinensis* ditemukan di kawasan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur,

tepatnya di Pantai Lango dan Pulau Kowangan, Kabupaten Penajam Paser Utara. Temuan ini menambah catatan persebaran spesies yang sebelumnya juga diketahui terdapat di Berau. Di kawasan tersebut, pohon ini tumbuh pada zona mangrove lapis kedua dengan substrat yang didominasi oleh pasir dan hanya tergenang saat pasang tinggi. Habitatnya berdampingan dengan berbagai jenis mangrove lain seperti *Rhizophora*, *Sonneratia*, *Avicennia*, *Lumnitzera*, dan *Xylocarpus*.

Penelitian mencatat sekitar 527 individu *C. philippinensis* di Pantai Lango. Menariknya, lebih dari 80 persen populasi tersebut merupakan semaian atau anakan muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa spesies tersebut masih memiliki kemampuan regenerasi alami yang cukup baik. Namun, karena populasinya terkonsentrasi di area yang sempit dan terlokalisasi, keberadaannya tetap rentan terhadap gangguan lingkungan dan perubahan habitat.

Saat ini *Camptostemon philippinensis* berstatus Terancam Punah dalam Daftar Merah IUCN dan termasuk tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Status tersebut menegaskan pentingnya upaya konservasi untuk menjaga kelangsungan hidup spesies ini di alam.

Selain nilai ekologisnya, *C. philippinensis* juga memiliki potensi ilmiah yang menarik. Sejumlah penelitian awal menunjukkan bahwa daun dan kulit kayunya mengandung senyawa bioaktif yang berpotensi memiliki aktivitas antibakteri dan antimelanogenik. Meski masih memerlukan penelitian lebih lanjut, temuan ini membuka peluang pemanfaatan mangrove sebagai sumber bahan alami di masa depan.

Peneliti juga menemukan indikasi hubungan ekologis antara *C. philippinensis* dan bekantan, primata endemik Kalimantan yang berstatus dilindungi. Bekas gigitan pada daun serta keberadaan kelompok bekantan di sekitar habitat mangrove ini menunjukkan kemungkinan pemanfaatan spesies tersebut sebagai sumber pakan, meskipun hal ini masih perlu dikaji lebih lanjut.

Sebagaimana mangrove pada umumnya, *Camptostemon philippinensis* berperan penting dalam melindungi wilayah pesisir dari abrasi, menangkap sedimen, menyerap karbon, serta menyediakan habitat bagi berbagai satwa perairan. Keberadaan mangrove langka ini menjadi pengingat bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum banyak dikenal dan perlu dijaga agar tetap lestari untuk generasi mendatang.

Sumber: Berbagai sumber

Di antara rimbunnya pepohonan hutan, taman kota, hingga pekarangan rumah, sering terlihat seekor burung kecil yang bergerak lincah sambil mengembangkan ekornya seperti kipas. Burung itu adalah sikatan kipas (*Rhipidura* spp.), anggota genus *Rhipidura*, yang dikenal karena kelincihannya memburu serangga dan kebiasaan uniknya berkicau bahkan saat malam hari.

Sekilas, sikatan kipas tampak sederhana. Namun, burung pengicau dari keluarga Rhipiduridae ini menyimpan banyak keunikan. Genus *Rhipidura* terdiri atas lebih dari 40 spesies yang tersebar luas mulai dari Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia, hingga Kepulauan Pasifik. Indonesia sendiri menjadi rumah bagi sejumlah spesies, termasuk kipasan belang (*Rhipidura javanica*) yang kerap dijumpai di hutan sekunder, taman, pekarangan, hingga kawasan mangrove.

Ciri paling mencolok dari burung ini adalah ekornya yang panjang dan sering dibentangkan menyerupai kipas. Ekor tersebut bukan sekadar hiasan. Saat

berburu, sikatan kipas memanfaatkannya sebagai alat manuver untuk berbelok cepat di udara ketika mengejar mangsa. Kemampuan aerobatik ini membuat mereka menjadi pemburu serangga yang sangat efektif.

Dengan panjang tubuh sekitar 15–20 sentimeter, sikatan kipas termasuk burung berukuran kecil. Warna bulunya umumnya merupakan kombinasi abu-abu, hitam, putih, atau cokelat, meskipun setiap spesies memiliki corak yang berbeda. Menariknya, membedakan jantan dan betina sering kali tidak mudah karena sebagian besar spesies tidak memiliki perbedaan warna bulu yang mencolok.

Salah satu fakta paling menarik tentang sikatan kipas adalah kebiasaan bernyanyinya. Kebanyakan burung pengicau aktif berkicau saat pagi atau menjelang sore, tetapi beberapa populasi sikatan kipas justru sering terdengar bersuara pada malam hari. Fenomena ini diduga berkaitan dengan musim kawin, perilaku mempertahankan wilayah, atau pengaruh cahaya buatan di lingkungan perkotaan yang mengubah ritme aktivitas mereka.

Selain suaranya yang merdu, gaya berburu sikatan kipas juga menarik untuk diamati.

Mereka sering bertengger diam di sebuah ranting, mengawasi serangga yang melintas, lalu melesat secepat kilat untuk menangkap mangsa sebelum kembali ke tempat semula. Teknik berburu ini dikenal sebagai sallying dan banyak digunakan oleh burung pemakan serangga.

Makanan utama sikatan kipas terdiri atas lalat, nyamuk, semut terbang, ngengat kecil, dan berbagai serangga bersayap lainnya. Karena itu, burung ini berperan penting sebagai pengendali alami populasi serangga. Kehadirannya membantu menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mengurangi jumlah hama yang dapat merusak tanaman.

Saat musim berbiak, pasangan sikatan kipas membangun sarang berbentuk cawan kecil yang sangat rapi. Sarang tersebut dibuat dari rumput halus, lumut, serat tumbuhan, dan jaring laba-laba yang berfungsi sebagai perekat alami. Dalam satu kali bertelur, induk biasanya menghasilkan dua hingga empat butir telur yang kemudian dirawat bersama hingga anak-anaknya mampu terbang.

Meski dikenal adaptif dan dapat hidup di berbagai habitat, sikatan kipas tetap menghadapi ancaman akibat hilangnya tutupan hutan dan berkurangnya ruang hijau. Padahal, keberadaan burung kecil ini sering menjadi indikator bahwa suatu lingkungan masih memiliki vegetasi dan populasi serangga yang sehat.

Mungil, lincah, dan penuh kejutan, sikatan kipas membuktikan bahwa satwa kecil pun memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan alam. Dengan ekornya yang unik dan kicauannya yang kadang menemani malam, burung ini menjadi salah satu penghuni alam yang layak mendapat perhatian dan perlindungan.

Sumber: goodnewsfromindonesia.id

Sikatan Kipas, Si Mungil yang Bernyanyi di Malam Hari



Foto: goodnewsfromindonesia.id

Mengutamakan Kebersamaan, Brigjen Pol. Ade Ary Syam Indradi Raih Predikat Akademik Terbaik P3N Angkatan XXVII

Brigjen Pol. Ade Ary Syam Indradi, S.H., S.I.K., M.H., Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri sekaligus lulusan Akademi Kepolisian (Akp) 1998, menerima predikat Akademik Terbaik pada Program Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan 27 Lemhannas RI. Bagi Ade Ary, penghargaan tersebut bukanlah pencapaian individu, melainkan hasil dari semangat

kebersamaan yang dibangun seluruh peserta selama mengikuti pendidikan.

"Saya hanya perwakilan penerima, tetapi penghargaan ini milik keluarga besar P3N 27. Semua peserta hebat, berdedikasi, berkontribusi, dan bergotong royong selama proses pendidikan," ujarnya.

Sebagai Ketua Senat P3N Angkatan 27, Ade Ary merasakan secara langsung dinamika pembelajaran yang berlangsung selama program. Menurutnya, setiap peserta memiliki pengalaman, kompetensi, dan perspektif yang saling melengkapi sehingga setiap diskusi menjadi ruang bertukar gagasan yang konstruktif.

"Teman-teman di P3N 27 keren semua. Ide-idenya baru dan semuanya memiliki semangat yang sama, yaitu mewujudkan Indonesia yang maju," katanya.

Ade Ary menilai tantangan terbesar dalam menjalani pendidikan bukan berasal dari materi pembelajaran maupun lingkungan akademik, melainkan dari kemampuan untuk terus mengembangkan diri. Baginya, setiap pemimpin harus mampu mengalahkannya keterbatasan dirinya sendiri agar dapat memberikan

kontribusi terbaik bagi organisasi dan bangsa.

"Bagi saya, musuh terbesar adalah diri sendiri," ungkapnya.

Nilai tersebut selaras dengan semangat kolaborasi yang terus dibangun selama pendidikan. Menurutnya, keberhasilan membangun bangsa tidak dapat dicapai oleh individu yang bekerja sendiri, melainkan melalui kerja sama, gotong royong, dan sinergi antarpemimpin dari berbagai latar belakang.

"Tidak ada yang lebih hebat atau lebih pintar. Yang ada adalah super team. Kita bekerja bersama, bahu-membahu untuk Indonesia," ujarnya.

Atas penghargaan yang diterimanya, Ade Ary mempersembahkannya kepada bangsa Indonesia, Lemhannas RI, kedua orang tua, keluarga, serta seluruh peserta P3N Angkatan 27 yang telah menjalani proses pembelajaran bersama.

Ade Ary juga mengajak seluruh peserta P3N Angkatan 27 untuk terus menjaga silaturahmi dan semangat kebersamaan yang telah terbangun selama mengikuti pendidikan. Menurutnya, jejaring antarpeserta merupakan modal penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan. "Jangan putus silaturahmi. Terima kasih atas kerja sama dan kekompakan selama ini. Semoga kita terus memberikan karya terbaik bagi bangsa dan negara," pesannya.



Mengangkat Potensi Laut Lepas, Laksma TNI Ignatius Bayu Trikuncoro Raih Predikat KKP Terbaik P3N Angkatan XXVII

Laksamana Pertama TNI Ignatius Bayu Trikuncoro, S.E., M.M., CHRMP., Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) dan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) 1994, meraih predikat Kertas Karya Perseorangan (KKP) Terbaik pada Program Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan 27. Melalui KKP berjudul "Penguatan Perikanan Laut Lepas Guna Mendukung Ketahanan Pangan", Bayu menawarkan gagasan pemanfaatan potensi perikanan laut lepas sebagai salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Menurut Bayu, Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena berada di persimpangan dua samudra dan dua benua. Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya perikanan di laut lepas yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

"Ini berkaitan dengan posisi silang Indonesia di dua samudra dan dua benua. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan, sehingga menjadi peluang yang perlu kita optimalkan," ujarnya.

Selama mengikuti pendidikan P3N, Bayu menyusun KKP melalui studi literatur dengan menghimpun berbagai referensi sebagai dasar analisis. Seluruh referensi tersebut kemudian dianalisis untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan dalam mendukung penguatan sektor perikanan nasional.

Bagi Bayu, penyusunan KKP tidak hanya menjadi proses akademik, tetapi juga bagian dari pengalaman belajar selama mengikuti P3N. Selama tiga setengah bulan menjalani pendidikan, Bayu

memperoleh banyak manfaat, mulai dari penguatan integritas, perluasan jejaring antarpimpinan, hingga kesempatan membangun sinergi dengan peserta dari berbagai kementerian dan lembaga.

"Selama 3,5 bulan saya terus berusaha memahami alasan mengapa mengikuti program ini. Ternyata manfaatnya sangat besar. Kami mendapatkan integritas, berteman, dan dapat bersinergi dengan kementerian-kementerian lain," ungkapnya.

Keunggulan KKP yang disusun Bayu terletak pada perspektif yang ditawarkan. Kajian tersebut tidak hanya berfokus pada pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah yurisdiksi Indonesia, tetapi juga mendorong Indonesia untuk memanfaatkan peluang yang tersedia di kawasan laut lepas sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

"Di luar yurisdiksi kita, sebenarnya Indonesia memiliki hak untuk berkompetisi di laut lepas," jelasnya.

Bayu berharap rekomendasi dalam KKP tersebut dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan kebijakan perikanan nasional. Menurut Bayu, apabila aktivitas perikanan Indonesia di laut lepas semakin berkembang, penguatan kehadiran negara juga perlu dilakukan melalui sinergi TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan

Laut agar aktivitas perikanan nasional dapat berlangsung secara aman dan berkelanjutan.

"Kita berharap Indonesia mampu berkompetisi di laut lepas dengan dukungan pengamanan yang memadai sehingga konsep blue water fisheries dapat diwujudkan," katanya.

Bayu juga berpesan kepada peserta P3N angkatan berikutnya agar tidak menjadikan penghargaan sebagai tujuan utama. Menurut Bayu, karya terbaik akan lahir ketika peserta fokus mengeksplorasi gagasan, menikmati proses pembelajaran, dan menyusun kajian sesuai kaidah yang telah ditetapkan.

"Jika ingin mendapatkan KKP terbaik, jangan berpikir untuk mendapatkan KKP terbaik. Lepaskan beban tersebut, eksplorasi seluruh kemampuan yang dimiliki, nikmati proses penulisannya, dan ikuti kaidah penulisan sesuai peraturan yang berlaku," pesannya.





1



2

- 1 Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Deputy Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI, Mayjen TNI Raden Djaenudin Slame pada Rabu (22/04).
- 2 Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. menerima audiensi dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat di Ruang Tamu Gubernur, pada Senin (13/4).
- 3 Pelantikan Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma, S.E., M.M., M.Sc. sebagai Wakil Gubernur Lemhannas RI di Ruang Hening, Gedung Trigatra Lemhannas RI, pada Selasa (28/4).





4 Lemhannas Fun Run dalam rangka HUT Ke-61 Lemhannas RI pada Minggu (24/05).

5 Gubernur Lemhannas RI bersama jajaran pimpinan Lemhannas RI melakukan ziarah dan tabur bunga ke Makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur pada Rabu (13/5) dalam rangkaian HUT Ke-61 Lemhannas RI.

6 Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., memberikan Kuliah Umum dalam kegiatan "Lemhannas Goes to Campus" di Universitas K.H. Abdul Chalim dan Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto, Jawa Timur pada Selasa (12/05).



5



6

7 Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memberikan pembekalan kepada para peserta P3N 27 dan P4N 69 Lemhannas RI di Istana Wapres, pada Rabu (3/6)



8 Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si mendampingi sejumlah peserta Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) 69 Lemhannas RI ke Jepang mulai dari tanggal (8-10/6)



9 Pelatihan Untuk Pelatih/Training of Trainers (ToT) program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi angkatan ke-38 Tahun 2026 di Lapangan Tengah Lemhannas RI, pada Selasa (23/6)





Selamat Hari Raya

Galungan & Kuningan





SELAMAT DATANG DAN SELAMAT MENGEMBAN TUGAS

LAKSAMANA MADYA TNI ERWIN S. ALDEDHARMA

WAKIL GUBERNUR LEMHANNAS RI

